

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BARINGENG  
KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:  
**SYAMSU ALAM**  
NIM: 10800110082

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsu Alam  
NIM : 10800110082  
Tempat/Tgl. Lahir : Baringeng / 11 Februari 1992  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi  
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam  
Alamat : Jln. Andi Tonro No. 20 Sungguminasa Kel. Bonto-  
Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa  
Judul : “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan  
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  
Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa  
Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 Desember 2014

Penyusun,

**Syamsu Alam**

**10800110082**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng”. Salam dan salawat penulis haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw serta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Skripsi ini merupakan salah satu jenjang untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin.

Secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Saheri dan ayahanda Muh Tang yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis

Selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Qadir Gassing., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Madjid., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi SE, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. Abdul Wahid Haddade Lc., M.HI. Selaku Penasehat Akademik penulis, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester 1 hingga selesainya penulis menempuh studi.
5. Bapak Jamaluddin Madjid., SE, M.Si. dan Dr. Hj. Noer Huda Noor M.Ag. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama penulis melakukan studi.
7. Segenap pemerintah kabupaten Soppeng yang telah memberi izin saya sebagai peneliti untuk meneliti di wilayahnya.
8. Pemerintah kecamatan Lilirilau yang telah memberikan data-data terkait penelitian saya.
9. Segenap pemerintah desa Baringeng beserta masyarakatnya yang telah membantu saya dalam menyebarkan kuesioner penelitian saya dan mengisi kuesioner penelitian saya.

10. Para Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas bantuannya.
11. Teman-teman dan sahabat-sahabat angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, adik-adik dan kakak-kakak dan alumni Akuntansi UIN Alauddin Makassar yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan masukan kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-19</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Hipotesis .....	10
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	14
E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>20-35</b>
A. Konsep Teori .....	20
B. Pajak .....	22
C. Sosialisasi Pajak.....	28
D. Kesadaran Wajib Pajak.....	29
E. Sanksi Pajak.....	31
F. Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
G. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36-44</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37

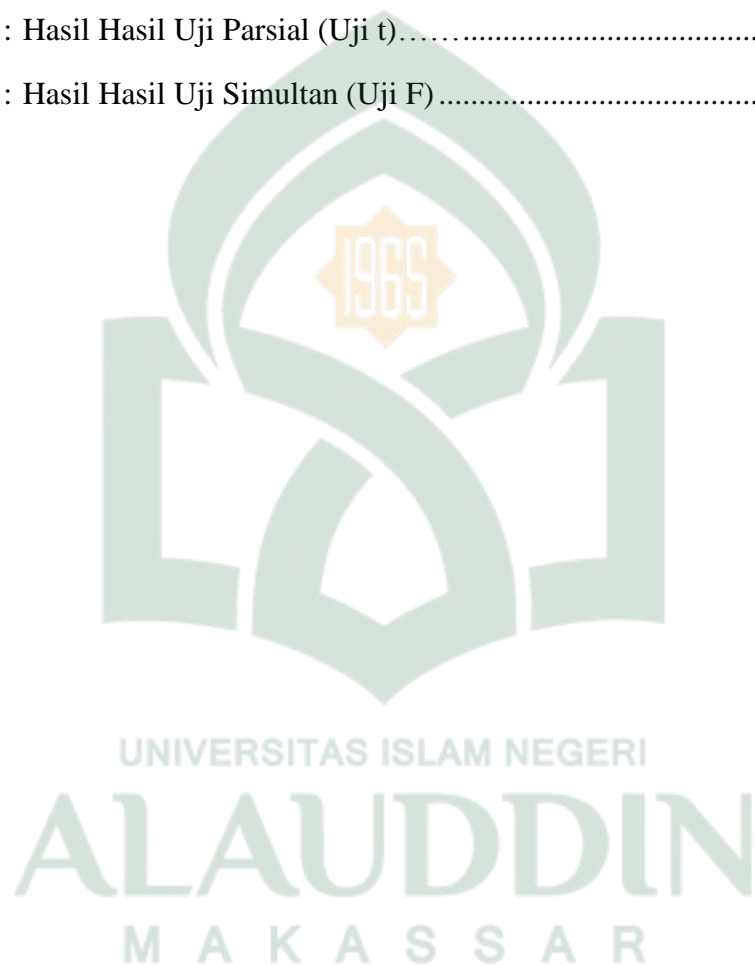
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen penelitian .....	39
F. Pengukuran Variabel .....	40
G. Uji Kualitas Data .....	40
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45-77</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Hasil Uji Kualitas Data .....	51
C. Hasil Analisis Deskriptif.....	54
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	64
E. Hasil Uji Hipotesis.....	68
F. Pembahasan .....	71
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>78-79</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Implikasi Penelitian.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80-82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Tersaring Kecamatan Lilirilau Sektor Pedesaan Tahun 2011-2013.....	8
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran.....	39
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Baringeng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013.....	46
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Baringeng Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013.....	47
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Desa Baringeng Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2013.....	47
Tabel 4.4 : Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Baringeng Tahun 2012-2013 .....	49
Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak .....	51
Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	52
Tabel 4.7 : Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak .....	52
Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	53
Tabel 4.9 : Hasil Uji Reabilitas.....	54
Tabel 4.10 : Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	55
Tabel 4.11 : Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.12 : Komposisi Responden Berdasarkan Umur .....	56
Tabel 4.13 : Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	57
Tabel 4.14 : Komposisi Responden Berdasarkan Komposisi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak.....	58
Tabel 4.15 : Ikhtisar rentang skala faktor-faktor kepatuhan wajib pajak .....	59
Tabel 4.16 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sosialisasi Pajak (X.1) .....	60
Tabel 4.17 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X.2)	61



Tabel 4.18 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak (X.3) .....	62
Tabel 4.19 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	63
Tabel 4.20 : Hasil Uji Normalitas .....	65
Tabel 4.21 : Hasil Uji Multikolonearitas.....	66
Tabel 4.22 : Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	68
Tabel 4.23 : Hasil Hasil Uji Parsial (Uji t).....	69
Tabel 4.24 : Hasil Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 :Uji Normaitas .....	65
Gambar 4.2 :Uji heteroskedastisitas .....	67



## ABSTRAK

**Nama : Syamsu Alam**

**NIM : 10800110082**

**Judul : Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.**

---

Penelitian ini berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* dan menetapkan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Dari 100 kuesioner yang disebarkan hanya sebanyak 95 kuesioner yang dapat diolah.

Data tersebut kemudian diuji kualitas datanya dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah dilakukan pengujian kualitas data kemudian diuji menggunakan uji asumsi klasik regresi berganda. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonearitas. Kemudian data dianalisis menggunakan uji koefisien determinasi, uji simultan (F) dan uji parsial (t).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya sosialisasi pajak secara rutin, sanksi pajak, harus dipertegas dan diawasi pengaplikasiannya dan kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan sehingga dengan begitu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan variabel penelitian diluar model yang diteliti dalam penelitian ini dan jangkauan penelitian bisa diperluas.

Kata kunci: sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sapriadi (2013;2) untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Koentarto, 2011;243).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Rustiyaningsih, 2011;44). Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Tjahyono, 2005;2 dalam Anita dkk, 2010;1). Penerimaan negara disektor perpajakan terdiri dari beberapa bentuk pajak seperti, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, pajak reklame dan lain-lain. Pajak yang terdiri dari beberapa bentuk biasanya pajak bumi dan bangunan yang hampir dikenakan kepada setiap warga negara. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk Indonesia telah memiliki tanah ataupun bangunan. Aset tetap yang dimiliki setiap warga negara tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan pajaknya ke pemerintah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak yang telah dibayarkan oleh para wajib pajak dipergunakan untuk melakukan pembangunan agar terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Q.S al-Baqarah:26 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ  
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya harta yang diinfakkan di jalan di ridhoi Allah swt akan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat dari Allah swt. Dalam konteks perpajakan, pajak (harta) yang dibayarkan oleh para wajib pajak akan dipergunakan pemerintah untuk pembangunan di berbagai sektor demi

kesejahteraan masyarakat. Balasan yang di dapat masyarakat pun sangat terasa dampaknya. Salah satu contoh pembangunan jalan dan jembatan di suatu daerah akan lebih mempermudah masyarakat untuk menjalankan segala aktivitasnya di banding hari-hari sebelumnya. Jadi ayat di atas telah mempertegas bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah swt yang benar dengan hati yang ikhlas akan dibalas olehNya berkali- kali lipat dari harta yang diinfakkanya.

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) merupakan pajak yang dipungut dari warga negara (subjek pajak) yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan dan memiliki hak atas aset tersebut kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa karakteristiknya ( Kahono, 2003;3) antara lain:

1. Nilai rupiahnya relatif kecil dibandingkan dengan pajak lain;
2. PBB mempunyai dampak yang luas karena hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan dan merupakan sumber penerimaan-penerimaan utama pemerintah daerah;
3. Jumlah Wajib Pajak (WP) PBB lebih banyak jika dibandingkan dengan pajak-pajak lain.
4. Penerimaan PBB yang terus cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
5. PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelolanya. Diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dialihkan menjadi pajak daerah (Sapriadi, 2013;1). Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk ke kas Daerah. Menurut Hendri dan Lena (2013;208) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak mengelola PBB masing-masing. Pendapatan yang di dapat dari PBB tersebut menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Rustiyaningsih (2011;48) ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan di daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Binambuni, 2013;2081). Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami



perpajakan terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Jika sosialisasi pajak dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain sosialisasi pajak cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar PBB sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar PBBnya yang lewat dari jadwal yang ditentukan. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum membayar tunggakan PBBnya. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Sapriadi, 2013;3). Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Apapun upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak patuh membayar pajaknya kalau bukan kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar PBBnya. Hal tersebut jelas karena kesadaran merupakan sesuatu yang muncul dari hati nurani seseorang. Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan jantung penggerak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan. Hal



ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menjadi warga negara yang beriman harus rela menunaikan kewajibannya atas harta yang dimilikinya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al Maidah:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menganjurkan bagi setiap umat manusia untuk menunaikan kewajibannya atas harta yang dimilikinya. Allah pun menjanjikan pahala yang besar atas harta yang diinfakkan. Jadi masyarakat diharuskan untuk sadar dan patuh dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak. Pajak yang dibayarkan nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Suyatmin (2004) dalam Nirmala (2012;21) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya

bahwa pajak yang sudah dibayar WP benar-benar digunakan untuk pembangunan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting. Sampai pada saat ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa membayar pajak itu adalah sebuah beban bagi mereka.

Fenomena tersebut dapat dilihat di Desa Baringeng dimana kepatuhan wajib pajaknya sangat rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemerintah/fiskus tidak pernah melakukan sosialisasi pajak di desa tersebut. Hal tersebut diperparah oleh maraknya kasus orang-orang pajak yang melakukan kecurangan terhadap uang pajak, salah satunya dengan menyalahgunakan uang pajak untuk kepentingan segelintir individu, melunturkan kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit. Hal tersebut tentunya akan mengurangi kesadaran wajib pajak yang berimbas pada rendahnya kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah juga tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah/fiskus. Sosialisasi yang tidak jalan, kesadaran wajib pajak yang rendah dan sanksi yang lemah dan tidak dikontrol berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari realisasi PBB di Desa Baringeng Kec. Liliilau Kab. Soppeng. Untuk melihat realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Liliilau dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Tersaring**  
**Kecamatan Lilirilau Sektor Pedesaan**  
**Tahun 2011-2013**

No.	Desa	Jumlah Pajak Yang Tidak Tersaring		
		2011	2012	2013
1.	Parenring	Rp. 77.222	Rp. 323.046	(Rp.3.813.482)
2.	Paroto	Rp. 11	(Rp. 594.097)	(Rp. 594.097)
3.	Palangiseng	Rp. 364.827	Rp. 294.962	Rp. 10.000
4.	Tetewatu	Rp. 3.437	Rp. 33.482	Rp. 10.822
5.	Masing	(Rp. 102.073)	Rp. 143.991	Rp. 3.716
6.	Kebo	(Rp. 4.658.293)	(Rp. 11.386.235)	(Rp. 22.555.635)
7.	Baringeng	(Rp. 15.727.086)	(Rp. 15.928.330)	(Rp. 21.562.010)
8.	Abbanuangge	Rp. 1.741.532	(Rp. 1.971.794)	Rp. 178.713
<b>Jumlah</b>		<b>(Rp. 18.300.445)</b>	<b>(Rp. 28.518.511)</b>	<b>(Rp. 48.321.973)</b>

*sumber: kantor kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng 2014*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 ada 5 desa yang tidak memiliki tunggakan PBB yakni Desa Parenring, Desa Paroto, Desa Palangiseng, Desa Tetewatu dan Desa Abbanuangge. Sementara desa yang tunggakan PBBnya paling banyak adalah Desa Baringeng yaitu Rp. 15.727.086. Pada tahun 2011 terlihat bahwa jumlah PBB yang paling banyak tidak tersaring adalah Desa Baringeng dengan jumlah Rp. 15.727.086

Pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa ada 4 desa yang tidak memiliki tunggakan PBB yakni Desa Parenring, Desa Palangiseng, Desa Tetewatu dan Desa Masing. Sementara desa yang paling banyak tunggakannya adalah Desa Baringeng yaitu Rp.15.928.330. Pada tahun 2012 tunggakan PBB Desa Baringeng bertambah yakni sebesar Rp.201.244. Desa Baringeng kembali menjadi desa paling tinggi tunggakan PBBnya.

Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa ada 4 desa yang tidak memiliki tunggakan PBB yakni Desa Palangiseng, Desa Tetewatu Desa Masing dan Desa Abbanuangge. Sementara desa yang tunggakan PBBnya paling tinggi adalah Desa Kebo yaitu Rp 22.555.635. Pada tahun 2013 tunggakan PBB Desa Baringeng naik cukup signifikan dengan kenaikan sebesar Rp.5.631.680 menjadi Rp. 21.562.010. Hal tersebut membuat Desa Baringeng semakin terpuruk dalam realisasi penerimaan PBB. Keterpurukan desa Baringeng tidak lain karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Data diatas mengindikasikan bahwa di desa Baringeng sedang mengalami masalah yakni rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan titik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### ***C. Hipotesis***

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Binambuni, 2013;2081). Lebih lanjut Binambuni (2013;2081) menyatakan bahwa adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan.

Penjelasan di atas sedikit menjelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat membuat wajib pajak sadar dan patuh membayar pajak. Sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk penyampaian informasi berupa nasehat dan arahan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Apabila pemerintah telah melakukan sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung ( melalui media cetak dan televisi) akan menyadarkan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

**H1: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

## 2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Boediono (1996) dalam Sapriadi (2013;10) kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Menurut Santi (2012;35) seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu secara suka rela tanpa paksaan.

Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006;23) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sapriadi, 2013;11). Kesadaran wajib pajak adalah hal yang mutlak harus dimiliki, karena ini menyangkut kewajiban kepada negara yang harus dibayar/dilunasi. Jika wajib pajak sadar untuk membayar pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan cenderung tinggi. Hal tersebut diperjelas oleh Dewinta dan Muchammad (2012;3-4) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk membayar **pajak** Bumi dan Bangunan.

**H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### 3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan (Masruroh, 2013;42). Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa apabila pemerintah secara sungguh-sungguh menjalankan sanksi perpajakan, maka dengan sendirinya masyarakat akan patuh membayar pajak.

Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur paksaan (Masruroh, 2013;42). Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak (Rustiyaningsih, 2011;51). Upaya sanksi pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh agar patuh membayar pajak. Menurut Arum (2012;13) kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, (Sapriadi, 2013;10). Dengan mengenakan sanksi pajak, maka wajib pajak akan sadar untuk bayar pajak.

Dari sisi lain wajib pajak dengan sendirinya sadar untuk membayar pajak apabila dianggap sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Menurut Jatmiko (2006;20) semakin banyak sisa tunggakan sanksi pajak yang harus dibayar wajib



pajak, maka akan semakin besar wajib pajak untuk melunasinya. Hal ini dikarenakan sanksi berupa denda akan lebih banyak. Jadi pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Sapriadi, 2013;10). Penjelasan di atas menggambarkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Larasati (2013;220) menambahkan bahwa pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika di dalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut.

### **H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **4. Pengaruh dominan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran merupakan sesuatu yang berasal **dari** dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena dorongan hati. Menurut Arum (2012;17) Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kepatuhan dalam perpajakan akan tinggi bilamana kesadaran masyarakat juga tinggi.

Menurut Sapriadi (2013;10) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa apapun usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib akan sia-sia jika bukan wajib pajak sendiri yang menyadari dirinya. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006;23) mempertegas bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.



#### **H4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Dominan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### ***D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

###### **1. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

###### **a. Variabel independen**

1. Sosialisasi pajak merupakan bentuk penyampaian/nasehat kepada wajib pajak mengenai tata cara perpajakan arah dan tujuan penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sanksi pajak adalah suatu bentuk tindakan berupa hukuman denda ataupun pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak baik disengaja maupun karena alpa.
3. Kesadaran wajib pajak adalah perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

###### **b. Variabel Dependen**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu bentuk sikap dari wajib pajak untuk taat, tunduk dan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak terdiri dari beberapa macam seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan yang lainnya pula. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen. Sementara untuk variabel independen peneliti hanya mengambil tiga faktor dari banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

### ***E. Kajian Pustaka/ Penelitian Tedahulu***

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doni Sapriadi (2013) mencoba menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib **ajak** dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *pootional sampling method*, dengan menggunakan rumus *Solvin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneilitian yang dilakukan oleh Anisa Nirmala Santi (2012) mencoba menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneilitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang diperoleh secara *incidental sampling*. Hasil penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional lingkungan, sanksi denda, dan sikap

fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang jauh berbeda antar variabel. Variabel sikap fiskus memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan dengan nilai *beta* 0,284 sedangkan variabel sikap rasional memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap kepatuhan dengan nilai *beta* 0,162.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrurroh (2013) mencoba untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan media kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel X pada penelitian ini berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) mencoba untuk menganalisis pengaruh sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan WP. Pengambilan sampel menggunakan metode *proportional sampling*. Metode pengumpulan datanya menggunakan angket (kuesioner). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Dony Binambuni (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PBB terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini

menggunakan metode asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh PBB terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian tidak memasukkan *grand theory* sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulud Kahono (2003) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap WP terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Metode pengumpulan data dengan kuesioner secara personal (*personalty administered questionnaires*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap WP tentang sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, serta sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian khususnya pada pengujian hipotesis menurut statistik dinyatakan bahwa sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum berpengaruh positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB, padahal secara logika semakin tinggi sikap WP memandang penghindaran PBB telah umum maka semakin rendah tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB (berpengaruh negatif).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Sapriadi yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan selupu rejang. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan variabel sosialisasi pajak, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak. selain itu penelitian ini juga dilakukan di kecamatan lilirilau kabupaten soppeng.

Perbedaan lainnya adalah pada variabel independen penelitian terdahulu tidak semua sama pada penelitian ini. Dalam hal ini ada satu atau dua variabel independen yang berbeda. Objek penelitiannya juga berbeda dengan sebagian peneliti

sebelumnya seperti Jatmiko, Masruroh dan Santi yang objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi untuk pajak penghasilan sedangkan penelitian ini objek penelitiannya wajib pajak orang pribadi untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian peneliti terdahulu di daerah Sumatera, Jawa dan Sulawesi Utara, maka penelitian ini dilakukan di daerah Sulawesi Selatan tepatnya di desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. Perbedaan yang terakhir jika peneliti sebelumnya meneliti pada tahun 2006, 2012 dan 2013, maka penelitian akan dilakukan pada tahun 2014.

#### ***F. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- b. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.
- c. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.
- d. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB ?

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mendukung dan mempertegas keabsahan hasil penelitian ini. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang lebih dominan pengaruhnya dan teori pembelajaran sosial menyatakan wajib pajak akan patuh bayar pajak bilamana mereka melihat kontribusi nyata atas pajak yang dibayarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya berbanding lurus dengan hasil penelitian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis mengenai pentingnya pajak dalam melakukan pembangunan daerah.

c. Manfaat Bagi Regulator/Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah terutama petugas pajak bahwa pentingnya sosialisasi pajak, dan sanksi pajak dalam menyadarkan wajib pajak dalam membayar PBB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Konsep Teori***

##### **1. Teori Atribusi**

Menurut Robbins (1996) dalam Kahono (2003;10) pada dasarnya teori tersebut mengatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Menurut Kahono (2003;10) perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dalam teori atribusi penggambarannya yaitu apakah faktor eksternal seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari sisi lain faktor internal juga dipertimbangkan dalam teori atribusi seperti kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Dalam teori ini faktor internal sangat ditekankan pada pribadi individu, karena menyangkut perilaku seseorang yang diaplikasikan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini seorang wajib pajak dituntut untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini maksudnya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah



bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Kahono (2013;11) terdapat dua hal yang dapat memutar balikkan arti atribusi. Pertama teori atribusi cenderung meremehkan faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua dalam teori atribusi cenderung faktor internal sebagai sebuah kesuksesan dan kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal.

## 2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung ( A. Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996 dalam Jatmiko, 2006;14). Menurut Kahono (2013;11) terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu:

- a. Proses perhatian ( *attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang / model jika mereka mengenal dan menaruh perhatian pada orang/model tersebut.
- b. Proses penahanan ( *retention*), yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
- c. Proses reproduksi motor, yaitu mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
- d. Proses penguatan ( *reinforcement*) adalah proses yang mana individu- individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku dengan model.

Teori pembelajaran sosial menggambarkan dimana seseorang akan taat dalam membayar pajak apabila individu tersebut melihat bukti secara langsung kontribusi pajak yang dibayarkan terhadap pembangunan daerah. Menurut Aryobimo(2012;12) Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Wajib pajak atau masyarakat dalam hal ini



membutuhkan bukti nyata dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Pemikiran masyarakat yang cenderung negatif membuat mereka tidak patuh bayar pajak. Masyarakat menganggap pajak yang mereka bayarkan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Jadi ininya pajak dibayar oleh wajib pajak harus dikembalikan kepada masyarakat dalam hal ini pembangunan daerah. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan pengelolaanya pun harus transparan.

## **B. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2010;3). Menurut Priantara (2009) dalam Sapriadi (2013;5) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan perundang- undangan;
- b. Pajak bersifat memaksa;
- c. Pajak merupakan suatu kewajiban;
- d. Pajak selain sebagai penerimaan juga bersifat mengatur;
- e. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- f. Pajak dipungut untuk dipergunakan untuk berbagai keperluan negara, termasuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009;3) pajak memiliki dua fungsi yakni sebagai berikut:

### a. Fungsi Penerimaan / *Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

### b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

## 3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;5) dalam Ash Shiddiq (2011;13-14) terdapat jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

### a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

### b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rustiyaningsih ( 2011;49) ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official assesment system*

*Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

*Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. *Withholding system*

*Withholding system* merupakan sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) dalam Aryobimo (2012;15) menambahkan satu sub point dalam sistem pemungutan pajak yakni *Semi Self assessment system*. *Semi Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang baik orang pribadi maupun badan. Jadi sistem pemungutan pajak menurutnya terbagi 4 (empat) yakni; *Official assement system*, *Self assement system*, *Semi Self assesmnet system*, dan *Withholding system*.

Melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak sangat dilematis. Hal ini dikarenakan apabila pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terlalu tinggi maka masyarakat/wajib pajak tidak akan mau membayar pajak karena khawatir adanya penyalahgunaan pajak. Dari sisi lain apabila pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terlalu rendah maka pembangunan akan menjadi terhambat karena dana yang masuk menjadi kurang. Apabila ingin mengatasi masalah seperti ini maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Rahman (2011;52-53) syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil,
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan UU,
- 3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian,
- 4) Pemungutan pajak harus efisien, dan
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Apabila kelima syarat ini terpenuhi, maka sistem pemungutan pajak tidak akan menemui kesulitan apapun dalam melaksanakannya.

#### 5. Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB)

Menurut Adelina (2012;7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessment system*). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut kepada hampir seluruh warga negara yang memiliki aset baik berupa tanah maupun bangunan. Menurut Suyatmin (2004;19) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan (*objective/Zakelijik*), artinya penetapan pajak tidak dilihat dari kemampuan ekonomis subyek pajak, tetapi ditetapkan berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk penerimaan negara dari pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut sekali setahun. Jadi wajib pajak harus membayar pajak bumi dan bangunan sekali setahun. Wajib pajak tidak hanya orang pribadi tetapi juga bagi perusahaan/ badan yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan.

Menurut Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak bumi dan bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan menjadi paling tinggi 0,3 %. Selain itu, besaran NJOPTKP juga diubah dari sebelumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta, kini paling rendah Rp 10 juta per objek pajak. Selain mengubah besaran tarifnya, Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebelumnya,

NJKP ditetapkan 20-100 persen dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP, kini aturan tersebut tidak dipergunakan lagi.

Dengan demikian besarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,3\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}^{**}) \end{aligned}$$

Keterangan :

\* = Paling tinggi 0.3% ditetapkan sesuai peraturan daerah

\*\*=Paling rendah Rp. 10.000.000 sesuai peraturan daerah

PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Regulasi tentang PBB sangat ketat, karena ketika melakukan pembangunan harus dilaporkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) begitu pula apabila kita menambah atau merubah bentuk bangunan juga harus dilaporkan. Jika tidak dilaporkan maka bisa saja pemerintah akan memberikan sanksi bagi pelaku. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sadar bahwa setiap aset yang bertambah akan bertambah pula pajaknya. Setiap pajak yang dibayarkan akan kembali sendiri kepada masyarakat.

Hasil penerimaan PBB akan masuk ke kas negara (dalam hal ini pemerintah pusat). Hasil penerimaan tersebut sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah (Jamaluddin, 2011:256). Berdasarkan hasil

pembagian tersebut maka setiap daerah akan mempergunakannya untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

### ***C. Sosialisasi Pajak***

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam membayar pajak. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperlancar proses pembangunan. Apabila wajib pajak tidak patuh bayar pajak, maka penerimaan negara tidak maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada pembangunan di berbagai sektor akan terhambat. Terhambatnya pembangunan disebabkan kas negara yang kurang sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pajak yang dibayarkan kepada negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sosialisasi (Kurniawan, 2006;1).

Menurut Jumiarti (2012;4) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya setiap pajak yang dibayarkan kepada negara. Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat (Binambuni, 2013;2081).



Apabila masyarakat sadar membayar pajak, maka tentunya akan berdampak positif kepada roda pemerintahan dan segala aktivitas perekonomian yang berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan lancarnya masyarakat membayar pajak membuat kas negara tidak pernah kekurangan. Hal tersebut akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan di berbagai sektor berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian dan aktivitas lain masyarakat pada umumnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kenyamanan dan kemudahan aktivitas bagi warga negara Indonesia sendiri. Jadi, intinya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan kembali kepada diri sendiri, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengelola.

#### ***D. Kesadaran Wajib Pajak***

Kendala dalam pelaksanaan pajak daerah beserta penyelesaiannya adalah yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak, kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas, keterlambatan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak (Budiati, 2013;15). Menurut Jatmiko (2006;22) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2009) dalam Santi (2012;20) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Lebih lanjut Muliari dan Setiawan (2009) dalam Santi (2012;21) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:



1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan,
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela,
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Jatmiko (2006;23) kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaanya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007 dalam Sapriadi, 2013;11). Kesadaran wajib pajak membayar pajak menjadikan masyarakat akan tunduk dan patuh dalam membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam membayar pajak. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006;23) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Dari sisi lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak membuat semua perencanaan pembangunan juga menjadi terhambat. Maka dari itu, segala upaya pemerintah lakukan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya membayar pajak. Pemerintah juga harus transparan dalam mengelola pajak daerah agar melahirkan kepercayaan dari masyarakat. Menurut Hardianingsih dan Nila (2011;130) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Apabila masyarakat sudah

mengetahui pengelolaan pajak secara baik, maka tidak akan sulit bagi wajib pajak/masyarakat sadar untuk bayar pajak.

### ***E. Sanksi Pajak***

Menurut Jatmiko (2006;19) sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Menurut Tjahjono (2005;464) dalam Sapriadi (2013;9), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Menurut Pranadata (2014;7) sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya

Muliari dan Setiawan (2010) dalam Masruroh (2013;29) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Arum (2012) dalam Masruroh (2013;28) sanksi adalah adalah suatu tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Jadi sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma- norma atau peraturan perpajakan baik disengaja maupun karena dilupa.

Dalam riset Masruroh (2013;29) dijelaskan mengenai Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan ada dua macam sanksi, yakni:

1. Sanksi Administrasi, terdiri dari:
  - a. Sanksi administrasi berupa denda.
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
  - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana, terdiri dari:
  - a. Pidana kurungan.
  - b. Pidana penjara.

Berdasarkan undang- undang diatas jelas bahwa setiap wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan bentuk pembayarn kerugian kepada negara karena telat membaya pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan jeratan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang pelanggarannya tergolong berat.

#### ***F. Kepatuhan Wajib Pajak***

##### **1. Pengertian Kepatuhan**

Patuh dalam pengertian secara umum merupakan tunduk dan taat terhadap suatu hal. Patuh dalam istilah perpajakan berarti tunduk dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Sapriadi

(2013;7) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Gibson dkk (2000) dalam Santi (2012;17) berpendapat bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Kahono (2003;22) “Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal perpajakan aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan”. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tunduk dan taat terhadap suatu aturan yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Prihartanto dan Devy, 2013;4). Seorang wajib pajak harus tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan yang disertai dengan motivasi yang tinggi.

## 2. Jenis- jenis Kepatuhan

Berdasarkan data yang dikutip dari Sapriadi ( 2013;7) ada dua jenis kepatuhan, yaitu:

- a. kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang –Undang perpajakan.

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut- turut.

- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan jenis pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 tahun terakhir.

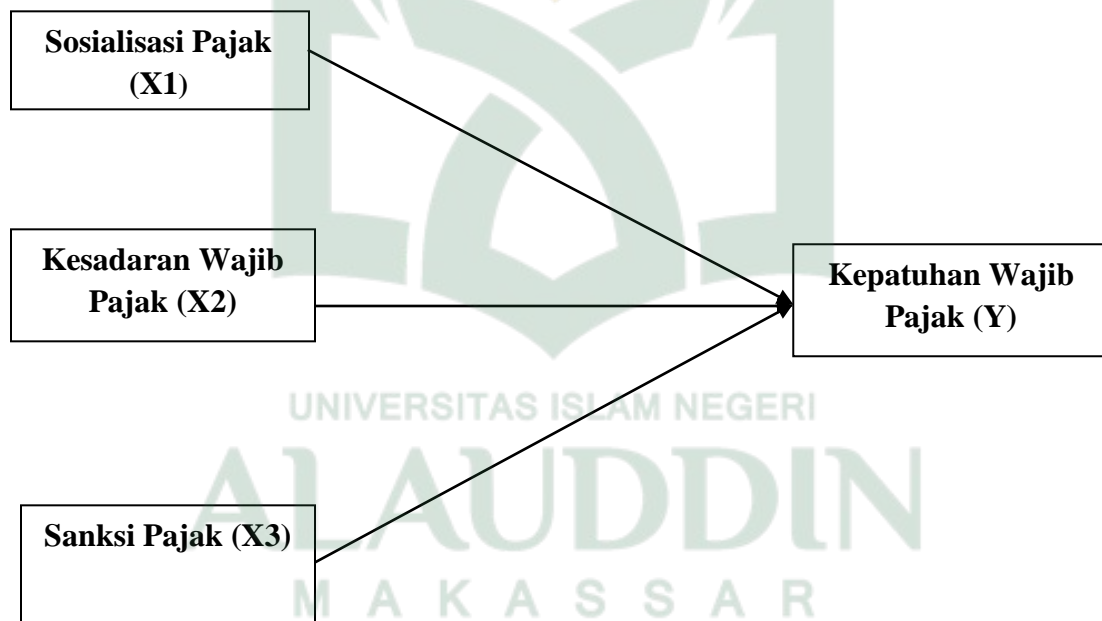
#### ***G. Kerangka Pikir***

Secara umum pajak merupakan suatu kewajiban bagi semua warga negara untuk membayarnya. Tujuannya ialah untuk memperlancar pembangunan demi mendorong aktivitas ekonomi dan sektor lainnya agar masyarakat sejahtera. Pajak terdiri dari beberapa jenis. Salah satu pajak yang paling besar pemasukannya kepada kas negara/daerah adalah PBB. Hampir seluruh warga negara Indonesia dikenai Pajak Bumi dan Bangunan. Pada prakteknya membayar PBB adalah hal yang paling lambat dilakukan oleh para wajib pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak patuh membayar pajak.

Pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam, pemerintah melakukan banyak cara agar masyarakat patuh membayar pajak. Adapula yang muncul dari diri sendiri untuk membayar pajak. Apabila ingin membuat masyarakat patuh membayar pajak, maka pemerintah harus melakukan berbagai cara. Cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi pajak. Cara tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat

patuh membayar pajak. Sanksi pajak juga diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak. Hal lain yang berpengaruh adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak. Menurut Sapriadi (2013) rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan memengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya. Jadi jelas bahwa kesadaran pajak berpengaruh pada kepatuhan perpajakan.

**GAMBAR 2.1**  
**Kerangka Pikir**



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan data berupa angka- angka. Angka- angka diperoleh dari jawaban para responden yang jumlahnya tergolong banyak sehingga harus diolah menggunakan data SPSS. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis yang telah diajukan, agar metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Klasifikasi penelitian ini berdasar sifat dan jenis data menggunakan penelitian opini. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan berupa opini atau pendapat orang (responden) baik secara individu maupun secara kelompok.

###### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. Peneliti melakukan penelitian di daerah ini karena peneliti menganggap tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di Bab I, dimana tunggakan penerimaan PBB Desa Baringeng yang paling banyak di antara desa lain. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di desa Baringeng masih rendah. Sebenarnya masih ada desa lain yang memiliki tunggakan PBB tinggi, tetapi peneliti tidak menjadikannya objek



penelitian karena potensi pajaknya sedikit. Faktor lainnya adalah tunggakannya juga sedikit, jika dibandingkan dengan desa Baringeng.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi yuridis dan pendekatan ekonometrik.. Hal ini dikarenakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus ada ketentuan, aturan dan tata cara membayar pajak dalam perundang- undangan perpajakan yang mengatur wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar iuran kepada negara. Hal tersebut terikat dengan ketentuan yuridis. Pendekatan ekonometrik merupakan salah satu bidang statistika yang mengukur dan menguji empiris hubungan antara variabel- variabel ekonomi secara kuantitatif berdasarkan data empiris.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi penelitian**

Penentuan populasi dalam penelitian ini diarahkan pada masyarakat yang masih tergolong masih rendah tingkat kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jumlah wajib pajak yang ada di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah 1056 orang. Pemilihan lokasi tersebut tidak lain karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

## 2. Sampel penelitian

Dalam penarikan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel/responden yang dipilih kriterianya adalah wajib pajak yang umurnya 20 tahun keatas, pendidikannya minimal tamatan SMU dan sudah menjadi wajib pajak. Penentuan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin* berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

(Rao, 1996 dalam Jatmiko, 2006; 36):

Keterangan:

N : populasi

e : tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

$$n = \frac{1056}{1 + 1056(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1056}{11,56}$$

$$n = 91,34 \text{ dibulatkan menjadi } 92$$

Jadi, batas minimum jumlah sampel/responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 orang.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada wajib pajak. Kuesioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak selaku responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh responden yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan untuk

mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka harus dijawab oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang jumlahnya dibatasi akan diberikan kuesioner untuk dijawab demi efisiensi waktu.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggunakan skala likert dengan alternatif lima jawaban. Hasil jawaban para responden akan mengisi jawaban yang tepat dari kelima jawaban yang ditawarkan dan soal pertanyaan. Hasil jawaban dari para responden akan dihitung melalui SPSS statistik.

**Tabel. 3.1**

**SKALA PENGUKURAN**

<b>Skala likert</b>	<b>Poin penilaian</b>
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

### ***F. Pengukuran Variabel***

Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{X_n - X_1}{K}$$

Keterangan :

C	=	Perkiraan besarnya kelas
K	=	Banyaknya kelas
$X_n$	=	Nilai observasi terbesar
$X_1$	=	Nilai observasi terkecil

### ***G. Uji Kualitas Data***

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian/instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukur dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk test/kuesioner, maka pengujian validitas yang digunakan berupa pengujian validitas isi (*content validity*).

Pengujian validitas isi dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan korelasi product moment (*Product Moment Pearson Correlation*). Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi  $r$  hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel maka nomor item tersebut tidak valid dan jika nilai  $r$  hitung  $> r$

tabel maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## 2. Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/ Pernyataan adalah konsisiten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama. Reliabilitas (*reliability*) adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Pada uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik.

## H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Menurut Sekaran (2006) dalam Sapriadi (2013) analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variable terikat. Adapun uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui

apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogrov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05.

#### b. Uji Multikolonearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila ingin menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflanations Faktor (VIF)* < 10 dan yang *tolerance* > 0,1. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel atau menambah variabel bebasnya.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila ingin mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot* ). Jika:

- 1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### 2. Teknik Analsis Data

#### a. Adjusted R Square ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai  $R^2$

maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

#### b. Persamaan Regresi Berganda

Analisis data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = KpWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

$\beta$  = Konstanta

$X_1$  = SP (Sosialisasi Pajak)

$X_2$  = Ks WP (Kesadaran Wajib Pajak)

$X_3$  = SP (Sanksi Pajak)

$\beta_{1,2,3}$  = Koefesien regresi dari variabel X

$e$  = Standar error

#### c. Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika  $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$  dan  $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$ , berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan () untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau  $(5\%) = 0,05$ .

#### d. Uji Hipotesis (t- test)



Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari  $\alpha = 5\%$ , berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau  $(\alpha) = 0,05$  (5%). Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika tingkat signifikan  $< \alpha 0,05$ ,  $t_{hit} > t_{tab}$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak  $H_0$  pada pengujian hipotesis 1, 2, 3 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ .
- 2) Jika tingkat signifikan  $< 0,05$ ,  $t_{hit} > t_{tab}$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- 3) Jika tingkat signifikan  $> \alpha 0,05$ , dan  $t_{hit} < t_{tab}$  maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Objek Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum daerah penelitian**

Desa Baringeng adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Provinsi Sulaewesi Selatan tepatnya di jln. Poros Makassar-Wajo. Desa Baringeng terletak 9 km dari Ibu Kota Kecamatan, 21 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 171 km dari Ibu Kota Provinsi. Desa Baringeng berada di bagian Utara Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 21,2 Ha. Desa Baringeng merupakan desa terluas di kecamatan Lilirilau dari 7 desa dan 3 kelurahan lainnya. Adapun batas wilayah desa Baringeng adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Ujung;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kebo’;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Talo’ Tenreng; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Masing.

Desa baringeng pada umumnya memiliki 4 dusun yakni dusun Tanjongge, dusun Baringeng, dusun Pompulu’e dan dusun Takku. Desa baringeng juga memiliki 14 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tangga (RT) yang tersebar di 4 dusun. Sebelummnya desa Baringeng hanya memiliki 2 dusun yakni dusun Baringeng dan dusun Takku, namun pada tahun 2010 dimekarkan menjadi 4 dusun melalui izin dari pemerintah kabupaten Soppeng. Jumlah perangkat desa terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa 8 asisten pembantu dan staf desa, 3 Kepala Urusan Agama (KUA), 4 kepala dusun, 14 kepala RW dan 31 kepala RT.

Keadaan geografisnya digolongkan ke dalam daerah berdimensi dua, terdiri atas dataran tinggi yang meliputi sebagian wilayah dusun Baringeng dan Takku dan dataran rendah yang meliputi seluruh wilayah dusun Tanjongge dan dusun Pompulu'e dan sebagian wilayah dusun Baringeng dan dusun Takku. Ketinggian tanah dari permukaan laut yakni 70 meter. Banyaknya curah hujan yakni 35mm/tahun. Suhu udara pada siang hari 32 derajat celcius dan suhu udara pada malam hari 8 derajat celcius.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Baringeng Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2013**

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN		PERSENTASE	
	2012	2013	2012	2013
LAKI-LAKI	2.683 jiwa	2.740 jiwa	46,64%	46,57%
PEREMPUAN	3.069 jiwa	3.143 jiwa	53,36%	53,43%
JUMLAH	5.752 jiwa	5.883 jiwa	100%	100%

*Sumber: Kantor Desa Baringeng (2014)*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Baringeng pada tahun 2012 adalah 5.752 jiwa yang terdiri dari 2.683 jiwa atau 46,64% penduduk laki-laki, dan 3.069 jiwa atau 53,36% penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2013 adalah 5.883 jiwa yang terdiri dari 2.740 jiwa atau 46,57% penduduk laki-laki, dan 3.143 jiwa atau 53,43% penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan selisih 403 jiwa. Pertumbuhan penduduk desa Baringeng pada tahun 2013 adalah sebanyak 158 jiwa, dimana jumlah penduduk pada tahun 2012 tercatat sebanyak 5.752 jiwa dan pada tahun 2013 menjadi 5.883 jiwa. Jumlah Kepala

Keluarga (KK) di desa Baringeng adalah 1533 KK. Semua penduduknya berkewarganegaraan Indonesia.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Baringeng Berdasarkan Kelompok Umur**  
**Tahun 2013**

No.	Umur	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	0-13 tahun	1.546 jiwa	26,28%
2.	14-68 tahun	3.479 jiwa	59,14%
3.	69 tahun ke atas	858 jiwa	14,58%
	Jumlah	5.883 jiwa	100%

*Sumber: Kantor Desa Baringeng (2014)*

Jumlah penduduk usia muda (0-13 Tahun) di desa Baringeng pada tahun 2013 sebesar 1.546 jiwa atau 26,28%, penduduk usia produktif (14-68 Tahun) sebanyak 3.479 jiwa atau 59,14%, sedangkan penduduk usia tua (69 jumlah tahun keatas) berjumlah 858 jiwa atau 14,58%. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah penduduk dengan usia produktif dengan jumlah 3.479 jiwa atau 59,14%.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Baringeng Berdasarkan Mata Pencapaian**  
**Tahun 2013**

No.	Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Petani	2.922 orang	65,88%
2.	Pegawai Negeri Sipil	168 orang	4,83%
3.	Tentara	12 orang	0,34%
4.	Polisi	23 orang	0,66%

5.	Pedagang	105 orang	3,02%
6.	Tukang	24 orang	0,69%
7.	Buruh	46 orang	1,32%
8.	Pengrajin Tenun	68 orang	1,95%
9.	Pegawai Swasta	36 orang	1,03%
10.	Pengusaha	9 orang	0,26%
11.	Pensiunan	31 orang	0,89%
12.	Lainnya	35 orang	1,01%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.479 orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Desa Baringeng (2014)*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Baringeng mayoritas berprofesi sebagai petani kebun dan ladang yang berjumlah 2.922 orang atau 65,88%. Selebihnya pegawai negeri sipil 168 orang atau 4,83%, tentara 12 orang atau 0,34%, polisi 23 orang atau 0,66%, pedagang 105 orang atau 3,02%, tukang 24 orang atau 0,69%, buruh bangunan 46 orang atau 1,32%, pengrajin tenun 68 orang atau 1,95%, pegawai swasta 36 orang atau 1,03%, pengusaha 9 orang atau 0,26%, pensiunan 31 orang atau 0,89% dan yang lainnya 35 orang atau 1,01%. Banyaknya jumlah petani di desa Baringeng karena banyaknya lahan sawah dan kebun. Persawahan di desa Baringeng adalah sawah tadah hujan. Sawah di desa Baringeng akan produktif jika curah hujan yang turun relatif stabil.

Bentuk pembangunan di desa Baringeng ada dua yakni pembangunan dalam bidang umum dan pembangunan sarana olahraga. Pembangunan dalam bidang umum antara lain masjid sebanyak 8 buah yang tersebar di semua dusun, puskesmas 1 buah yang terletak di dusun Baringeng, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 6 buah yang tersebar di semua dusun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu buah yang terletak di dusun

Baringeng, perumahan sebanyak 2 buah yang terletak di dusun Tanjongge dan dusun Baringeng, pasar sebanyak satu buah yang terletak di dusun Baringeng, perkuburan sebanyak 3 buah yang terletak di dusun Pompulu'e dan dusun Takku. Desa Baringeng memiliki jalanan umum serta lorong aspal.

Pembangunan dalam bidang sarana olahraga antara lain lapangan sepak bola 3 buah yang terletak di dusun Tanjongge, dusun Baringeng dan dusun Takku, lapangan *volley* 4 buah yang tersebar di semua dusun, lapangan bulu tangkis sebanyak 2 buah yang terletak di dusun Pompulu'e dan dusun Baringeng, dan lapangan billyard sebanyak 2 buah yang ada di dusun Baringeng dan dusun Takku. Pengamanan dari segi kebakaran dilengkapi dengan 26 buah alat pemadam kebakaran. Semua penduduk desa Baringeng bergama islam dan dengan rasa kebersamaan dan gotong royong penduduk desa Baringeng melaksanakan ibadah dengan taat.

**Tabel 4.4**  
**Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Baringeng**  
**Tahun 2012-2013**

Tahun	Jumlah WP	Jumlah SPPT	Target	Realisasi
2012	1.049	3.001	Rp. 157.546.874	Rp. 141.617.675
2013	1.056	3.012	Rp 150.533.914	Rp 128.971.904
Jumlah	2.099	6.013	Rp. 308.080.788	Rp. 270.589.579

*Sumber: Kantor Desa Baringeng (2014)*

Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang ada di desa Baringeng yakni 1049 orang. Jumlah Surat Penagihan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 3001 SPPT. Jumlah potensi pajaknya Rp. 157.546.874. Jumlah realisasi PBB adalah Rp. 141.617.675. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang ada di desa Baringeng bertambah menjadi

1056 orang. Jumlah Surat Penagihan Pajak Terutang (SPPT) menjadi 3012 SPPT. Jumlah potensi pajaknya turun menjadi Rp 150.533.914. Jumlah realisasi PBB juga turun menjadi Rp 128.971.904.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Terwujudnya Baringeng sebagai ATM ASIMTAQ (Aman, Tertib, Makmur, Adil Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa.”

### b. Misi

Misi desa Baringeng adalah sebagai berikut:

- 1) Belajar dari pengalaman.
- 2) Membina masyarakat hidup rukun dan harmonis melalui musyawarah, kekeluargaan dan cinta aparat keamanan.
- 3) Memajukan usaha pertanian dengan pola petik, olah jual dengan program penanaman tumpang sari.
- 4) Membina usaha kecil dengan sistem pelatihan dan pemasaran.
- 5) Membina generasi muda sebagai tulang punggung pelaksanaan pembangunan desa.
- 6) Memacu hubungan masyarakat melalui kegiatan ibadah.
- 7) Membina/membangun hubungan yang harmonis secara vertikal dan horizontal demi kesinambungan pembangunan desa Baringeng.



## B. Hasil Uji Kualitas Data

### 1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak**

<b>Instrumen penelitian</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pernyataan 1. X1	0,487**	0.202	Valid
Pernyataan 2. X1	0,350**	0.202	Valid
Pernyataan 3. X1	0,606**	0.202	Valid
Pernyataan 4. X1	0,640**	0.202	Valid
Pernyataan 5. X1	0,538**	0.202	Valid
Pernyataan 6. X1	0,688**	0.202	Valid
Pernyataan 7. X1	0,555**	0.202	Valid

Sumber: Data primer yang diolah(2014)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel sosialisasi pajak ( $X_1$ ) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai r hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > dari r tabel (0,202) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.5 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,202.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Pernyataan 1. X2	0,497**	0,202	Valid
Pernyataan 2. X2	0,729**	0,202	Valid
Pernyataan 3. X2	0,550**	0,202	Valid
Pernyataan 4. X2	0,678**	0,202	Valid
Pernyataan 5. X2	0,579**	0,202	Valid
Pernyataan 6. X2	0,551**	0,202	Valid
Pernyataan 7. X2	0,686**	0,202	Valid

Sumber: Data primer yang diolah(2014)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X<sub>2</sub>) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai r hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > dari r tabel (0,202) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.6 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,202.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak**

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Pernyataan 1 X3	0,715**	0,202	Valid
Pernyataan 2 X3	0,532**	0,202	Valid
Pernyataan 3 X3	0,723**	0,202	Valid
Pernyataan 4 X3	0,719**	0,202	Valid
Pernyataan 5 X3	0,660**	0,202	Valid
Pernyataan 6 X3	0,460**	0,202	Valid
Pernyataan 7 X3	0,659**	0,202	Valid

Sumber: Data primer yang diolah(2014)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai  $r$  hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > dari  $r$  tabel (0,202) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.7 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,202.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Instrumen penelitian	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Pernyataan 1.Y.1	0,498**	0,202	Valid
Pernyataan 2.Y.1	0,500**	0,202	Valid
Pernyataan 3.Y.1	0,560**	0,202	Valid
Pernyataan 4.Y.1	0,586**	0,202	Valid
Pernyataan 5.Y.1	0,613**	0,202	Valid
Pernyataan 6.Y.1	0,566**	0,202	Valid
Pernyataan 7.Y.1	0,602**	0,202	Valid

Sumber: Data primer yang diolah(2014)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai  $r$  hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > dari  $r$  tabel (0,202) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.8 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,202.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten atau stabil dari

waktu kewaktu. Reliabilitas yang dapat diterima berada di antara *range* 0,60 sampai 0,799 dan reliabilitas yang baik adalah yang melebihi 0,80 (Nurina,2010;26).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Alpha Cronbach's</i></b>	<b>Batas reliabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
Sosialisasi Pajak	0,631	0,60	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,724	0,60	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak	0,757	0,60	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,643	0,60	<i>Reliabel</i>

*Sumber: Data primer yang diolah (2014)*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini keandalannya dapat diterima. Hal ini dikarenakan *Alpha Cronbach's* berada di kisaran 0,7 atau lebih dari 0,60 yang merupakan batas reliabel.

### **C. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan analisis dari hasil sebuah jawaban para responden. Jawaban diberikan dengan mengisi kuesioner yang diberikan kepada para responden. Kuesioner yang diberikan berisi pernyataan yang diajukan oleh penulis. Hasil dari jawaban para responden akan di olah oleh penulis dan dihitung persentasenya. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui jawaban atau tanggapan terhadap item- item pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden yang sifatnya beragam. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Penelitian ini dimulai pada tanggal 22 septemeber 2014

– 22 oktober 2014. Kuesioner yang disebar kepada responden akan di ambil kembali setelah di isi oleh para responden. Tabel di bawah ini menunjukkan penjelasan yang lebih rinci mengenai tingkat pengembalian kuesioner.

**Tabel 4.10**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Kuesioner yang dibagikan	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	2	2%
Kuesioner yang tidak lengkap	3	3%
Kuesioner yang menjadi sampel	95	95%

*Sumber: Data primer yang diolah (2014)*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kuesioner yang dibagikan kepada responden berjumlah 100 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali berjumlah 2 atau 2% karena responden yang bersangkutan tidak dapat ditemui/ keluar kampung dalam waktu yang lama pada saat pengambilan kuesioner. Kuesioner yang tidak lengkap berjumlah 3 atau 3% karena pernyataan dalam kuesioner banyak yang tidak diisi. Kuesioner yang menjadi sampel berjumlah 95 atau 95% dari 100 kuisisioner yang disebar.

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum tentang responden yang diteliti. Karakteristik responden dapat dilihat pada lembaran pertama kuesioner pada bagian data responden yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lama menjadi wajib pajak. Data responden dapat di lihat lebih jelas pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 4.11**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Laki-Laki	52	54,74%
Perempuan	43	45,26%
Jumlah	95	100%

*Sumber: Data primer yang diolah (2014)*

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 95 jumlah responden/sampel yang terpilih terdapat 54,74 % atau 52 responden berjenis kelamin laki-laki dan 45,26 % atau 43 responden berjenis kelamin perempuan. Jadi, jumlah sampel terbanyak dalam penelitian ini adalah laki-laki.

**Tabel 4.12**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Umur**

<b>Umur (Tahun)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
20 – 25	17	18,68%
26 – 30	16	17,58%
31 – 35	13	14,29%
36 – 40	25	26,32%
> 40	24	25,26%
Jumlah	95	100%

*Sumber: Data primer yang diolah (2014)*

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa responden yang berumur antara 20 sampai 25 tahun sebanyak 17 orang atau 18,68%. Responden yang berumur antara 26 sampai 30 tahun sebanyak 16 orang atau 17,58%. Responden yang berumur antara 31 sampai 35 sebanyak 13 orang atau 14,29% responden yang berumur antara 36 sampai 40 sebanyak 25 orang atau 26,32%. Responden yang berumur di atas 40 tahun

sebanyak 24 orang atau 25,26%. Dengan demikian responden terbanyak berusia antara 36 sampai 40 tahun.

**Tabel 4.13**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SMA	70	73,68%
D1/D2	3	3,30%
D3	5	5,49%
S1	16	17,58%
S2	1	1,09%
Lain-lain	0	0%
Jumlah	95	100%

*Sumber: Data primer yang diolah (2014)*

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, terdapat 73,68% atau 70 responden berpendidikan terakhir setingkat SMA/ sederajat, 3,30% atau 3 responden berpendidikan terakhir setingkat D1/D2, 5,49% atau 5 responden berpendidikan terakhir setingkat D3, 17,58% atau 16 responden berpendidikan terakhir setingkat S1, 1,09% atau 1 responden berpendidikan terakhir setingkat S2 dan lain-lain jumlahnya 0%. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah responden yang berpendidikan SMA/ sederajat.

**Tabel 4.14**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak**

<b>Lama Membayar Pajak (tahun)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1-5	18	18,95%
6-10	19	20,88%



11-15	22	24,18%
>15	32	33,68%
Jumlah	95	100%

*Sumber: Data primer yang diolah (2014)*

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, sebanyak 18 responden atau 18,95% yang telah membayar PBB antara 1 sampai 5 tahun. Sebanyak 19 responden atau 20,88% telah membayar PBB antara 6 sampai 10 tahun. Sebanyak 22 responden 24,18% telah membayar PBB antara 11 sampai 15 tahun. Sebanyak 32 responden atau 33,68% telah membayar PBB selama lebih dari 15 tahun. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah responden yang telah membayar PBB selama lebih dari 15 tahun.

#### b. Tanggapan Responden

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan variabel Y adalah kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar PBB. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Intersepsi skor item pada variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu:

$$C = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,80 dengan demikian rentang skala 0,80 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Ikhtisar Rentang Skala Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Rentang</b>	<b>Sosialisasi Pajak</b>	<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>Sanksi Pajak</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>
$1 \leq X < 1,80$	SR	SR	SR	SR
$1,80 \leq X < 2,60$	R	R	R	R
$2,61 \leq X < 3,40$	S	S	S	S
$3,41 \leq X < 4,20$	T	T	T	T
$4,21 \leq X < 5$	ST	ST	ST	ST

Ket :

SR = Sangat rendah

R = Rendah

S = Sedang

T = Tinggi

ST = Sangat tinggi

#### 1. Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi Pajak

Pada penelitian ini, variabel  $X_1$  yaitu penerapan Sosialisasi pajak memiliki 7 pernyataan. Responden memilih satu dari lima skala atas pernyataan yang telah disediakan di kuesioner mengenai kondisi di daerahnya. Ringkasan jawaban itu bisa dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.16**  
**Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sosialisasi Pajak (X<sub>1</sub>)**

Jawaban Responden		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total	Rata-Rata ( $\frac{Skor}{F}$ )	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
X1.1	F	-	-	-	35	60	95	4,63	ST
	Skor	-	-	-	140	300	440		
	%	-	-	-	36,8	63,2	100		
X1.2	F	-	-	1	60	34	95	4,20	T
	Skor	-	-	3	236	160	399		
	%	-	-	3,2	63,2	35,8	100		
X1.3	F	-	-	3	31	61	95	4,61	ST
	Skor	-	-	9	124	305	438		
	%	-	-	3,2	32,6	64,2	100		
X1.4	F	-	-	4	40	51	95	4,50	ST
	Skor	-	-	12	160	255	427		
	%	-	-	4,2	42,1	53,7	100		
X1.5	F	-	-	6	68	21	95	4,16	T
	Skor	-	-	18	272	105	395		
	%	-	-	6,3	71,6	22,1	100		
X1.6	F	-	-	7	43	45	95	4,40	ST
	Skor	-	-	21	172	225	418		
	%	-	-	7,4	45,3	47,4	100		
X1.7	F	-	-	8	69	18	95	4,11	T
	Skor	-	-	24	276	90	390		
	%	-	-	8,4	72,6	18,9	100		
Rata – Rata Keseluruhan								4,37	ST

Sumber: Data Primer yang diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari 95 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel sosialisasi pajak berada pada daerah sangat tinggi dengan skor 4,37. Hal ini berarti bahwa sosialisasi pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel  $X_2$  yaitu Kesadaran Wajib Pajak memiliki 7 butir pernyataan. Responden memilih satu dari lima skala atas pernyataan yang telah disediakan di kuesioner mengenai kondisi di daerahnya. Ringkasan jawaban itu bisa dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.17**  
**Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )**

Jawaban Responden		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total	Rata-Rata ( $\frac{Skor}{F}$ )	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
X2.1	F	-	-	3	26	66	95	4,63	ST
	Skor	-	-	6	104	330	440		
	%	-	-	3,2	27,4	69,5	100		
X2.2	F	-	-	18	29	49	95	4,37	ST
	Skor	-	-	54	116	245	415		
	%	-	-	18,9	30,5	51,6	100		
X2.3	F	-	-	9	67	19	95	4,11	T
	Skor	-	-	27	268	95	390		
	%	-	-	9,5	70,5	20	100		
X2.4	F	-	-	7	49	39	95	4,34	ST
	Skor	-	-	21	196	195	412		
	%	-	-	7,4	51,6	41,1	100		
X2.5	F	-	-	6	62	27	95	4,22	ST
	Skor	-	-	18	248	135	401		
	%	-	-	6,3	65,3	28,4	100		
X2.6	F	-	-	3	62	30	95	4,28	ST
	Skor	-	-	9	248	150	407		
	%	-	-	3,2	65,3	31,6	100		

X2.7	<b>F</b>	-	-	9	42	44	<b>95</b>	4,37	ST
	<b>Skor</b>	-	-	27	168	220	<b>415</b>		
	<b>%</b>	-	-	9,5	44,2	46,3	<b>100</b>		
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>								<b>4,33</b>	<b>ST</b>

Sumber : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa dari 95 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pertanyaan pada variabel Kesadaran wajib pajak berada pada daerah sangat tinggi dengan skor 4,33. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 3. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak

Variabel  $X_3$  yaitu Kesadaran Wajib Pajak memiliki 7 butir pernyataan. Responden memilih satu dari lima skala atas pernyataan yang telah disediakan di kuesioner mengenai kondisi di daerahnya. Ringkasan jawaban itu bisa dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.18**  
**Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ )**

Jawaban Responden		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total	Rata-Rata ( $\frac{Skor}{F}$ )	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
X3.1	<b>F</b>	1	1	13	62	18	<b>95</b>	4	T
	<b>Skor</b>	1	2	39	248	90	<b>380</b>		
	<b>%</b>	1,1	1,1	13,7	65,3	18,9	<b>100</b>		
X3.2	<b>F</b>	-	2	4	59	30	<b>95</b>	4,23	ST
	<b>Skor</b>	-	4	12	236	150	<b>402</b>		
	<b>%</b>	-	2,1	4,2	62,1	31,6	<b>100</b>		
X3.3	<b>F</b>	1	4	13	61	16	<b>95</b>	3,92	T
	<b>Skor</b>	1	8	39	244	80	<b>372</b>		
	<b>%</b>	1,1	4,4	14,3	64,8	15,4	<b>100</b>		

X3.4	<b>F</b>	2	10	32	43	8	<b>95</b>	3,47	T
	<b>Skor</b>	2	20	96	172	40	<b>330</b>		
	<b>%</b>	2,2	11,0	34,1	83,6	6,6	<b>100</b>		
X3.5	<b>F</b>	2	7	16	41	29	<b>95</b>	3,93	T
	<b>Skor</b>	2	14	48	164	145	<b>373</b>		
	<b>%</b>	2,1	7,4	16,8	43,1	30,5	<b>100</b>		
X3.6	<b>F</b>	-	3	15	60	17	<b>95</b>	3,96	T
	<b>Skor</b>	-	6	45	240	85	<b>376</b>		
	<b>%</b>	-	3,2	15,8	63,2	17,9	<b>100</b>		
X3.7	<b>F</b>	-	3	7	40	45	<b>95</b>	4,34	T
	<b>Skor</b>	-	6	21	160	225	<b>412</b>		
	<b>%</b>	-	3,2	7,4	42,1	47,4	<b>100</b>		
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>								<b>3,98</b>	<b>T</b>

Sumber: Data Primer Yang Diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Sanksi Pajak berada pada daerah cukup tinggi dengan skor 3,98. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak cukup penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki 7 butir pernyataan. Responden memilih satu dari lima skala atas pernyataan yang telah disediakan di kuesioner mengenai kondisi di daerahnya masing masing. Ringkasan jawaban itu bisa dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.19**  
**Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepathan Wajib Pajak (Y)**

Jawaban Responden		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total	Rata-Rata ( $\frac{Skor}{F}$ )	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
Y.1	<b>F</b>	-	-	1	59	35	<b>95</b>	4,36	ST
	<b>Skor</b>	-	-	3	236	175	<b>414</b>		
	<b>%</b>	-	-	1,1	62,1	36,8	<b>100</b>		

Y.2	<b>F</b>	-	-	2	46	47	<b>95</b>	4,47	ST
	<b>Skor</b>	-	-	6	184	235	<b>425</b>		
	<b>%</b>	-	-	2,1	48,4	49,5	<b>100</b>		
Y.3	<b>F</b>	-	-	9	62	24	<b>95</b>	4,16	T
	<b>Skor</b>	-	-	27	248	120	<b>395</b>		
	<b>%</b>	-	-	9,4	65,3	25,3	<b>100</b>		
Y.4	<b>F</b>	-	-	4	42	49	<b>95</b>	4,47	ST
	<b>Skor</b>	-	-	12	168	245	<b>425</b>		
	<b>%</b>	-	-	4,2	44,2	51,6	<b>100</b>		
Y.5	<b>F</b>	-	-	7	69	23	<b>95</b>	4,34	ST
	<b>Skor</b>	-	-	21	276	115	<b>412</b>		
	<b>%</b>	-	-	6,6	74,7	23,1	<b>100</b>		
Y.6	<b>F</b>	-	3	5	68	19	<b>95</b>	4,08	T
	<b>Skor</b>	-	6	15	272	95	<b>388</b>		
	<b>%</b>	-	3,2	5,3	71,6	20	<b>100</b>		
Y.7	<b>F</b>	-	-	10	71	14	<b>95</b>	4,04	T
	<b>Skor</b>	-	-	30	284	70	<b>384</b>		
	<b>%</b>	-	-	10,5	74,7	14,7	<b>100</b>		
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>								<b>4,27</b>	<b>ST</b>

Sumber : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen berada pada daerah sangat tinggi dengan skor 4,27. Hal ini berarti bahwa responden sangat mengerti tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

#### **D. Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *one sampel kolmogrov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,480 >$



0,05. Pada normal *probability plot* distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika titik yang mengikuti garis diagonalnya maka data berdistribusi normal.

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

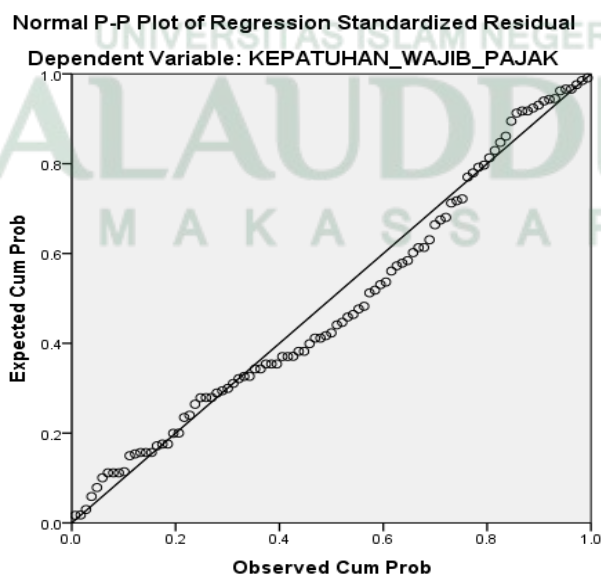
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76510050
	Absolute	.086
Most Extreme Differences	Positive	.086
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.480

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: output spss 2014

**Gambar 4.1**



## 2. Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila ingin menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *Variances Inflation Factors* (*VIF*) < 10 dan yang *tolerance* > 0,1. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel atau menambah variabel bebasnya.

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Multikolonearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.193	2.811		3.982	.000		
1 SOSIALISASI_PAJAK	.270	.111	.259	2.439	.017	.633	1.581
KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.216	.090	.257	2.391	.019	.618	1.619
SANKSI_PAJAK	.136	.061	.213	2.215	.029	.771	1.298

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

Sumber: output spss 2014

Interpretasi dari hasil ini terlihat tingkat *tolerance* sebagai berikut:

Sosialisasi Pajak = 0,633

Kesadaran Wajib Pajak = 0,618

Sanksi Pajak = 0,771

Interpretasi dari hasil ini terlihat tingkat VIF sebagai berikut:

VIF Sosialisasi Pajak = 1,581

VIF Kesadaran Wajib Pajak = 1,619

VIF Sanksi Pajak

= 1,298

Semua data variabel terbebas dari multikolinearitas karena memiliki tolerance di atas 0,1 dan VIF dibawah 10.

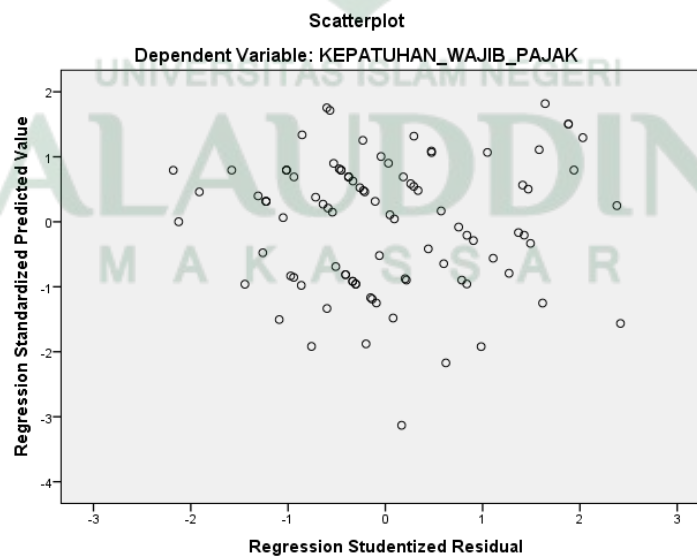
### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila ingin mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot* ). Jika:

- 1) Jika ada pola tertentu terdapat titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

**Gambar 4.2**

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model ini.

### **E. Hasil Uji Hipotesis**

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah pengujian hipotesis penelitian yang meliputi, koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.

#### **1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel Sosialisasi pajak, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi atau R Square ( $R^2$ ). Apabila ingin mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.591 <sup>a</sup>	.350	.328	1.794	.350	16.312	3	91	.000

a. Predictors: (Constant), SANKSI\_PAJAK, SOSIALISASI\_PAJAK, KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

*Sumber: Output SPSS (2014)*

Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,591 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang “sedang” karena berada pada interval 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,328 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak 32,8% dan sisanya 67,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Variabel yang peneliti maksud seperti kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

## 2. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang ditunjukkan pada table berikut.

**Tabel 4.23**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.193	2.811		3.982	.000
	SOSIALISASI_PAJAK	.270	.111	.259	2.439	.017
	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.216	.090	.257	2.391	.019
	SANKSI_PAJAK	.136	.061	.213	2.215	.029

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

Sumber: Output SPSS 21 (2014)

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,193 + 0,270 X_1 + 0,216 X_2 + 0,136 X_3 + e$$

Pada model regresi yang telah didapatkan penulis dengan taksiran diatas, maka memperlihatkan bahwa taksiran intersep dimana  $\beta_0 = 11,193$ , taksiran  $\beta_1 = 0,270$ , taksiran  $\beta_2 = 0,216$ , dan taksiran  $\beta_3 = 0,136$ . Penjelasan yang terperinci dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konstanta= 11,193, artinya ada atau tidaknya sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bertambah, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan mengalami perubahan baik bertambah ataupun berkurang (tetap).
- b. Koefisien regresi  $X_1 = 0,270$  artinya jika sosialisasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- c. Koefisien regresi  $X_2 = 0,216$  artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat..
- d. Koefisien regresi  $X_3 = 0,136$  artinya jika sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan bertambah.

### 3. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yaitu Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat yaitu berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Berikut adalah hasil pengujian simultan (uji F) :

**Tabel 4.24**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	157.493	3	52.498	16.312	.000 <sup>b</sup>
Residual	292.864	91	3.218		
Total	450.358	94			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI\_PAJAK, SOSIALISASI\_PAJAK, KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi sosialisasi pajak (X.1), kesadaran wajib pajak (X.2), dan sanksi pajak (X.3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) studi pada wajib pajak pribadi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,312 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,472 . Dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} (16,312) > F_{tabel} (2,472)$  jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai P value sebesar 0,000<sup>b</sup> lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan sosialisasi pajak (X.1), kesadaran wajib pajak (X.2), sanksi pajak (X.3), berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di desa Baringeng kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

#### ***F. Pembahasan***

Berikut ini adalah hasil pembahasan mengenai pengaruh sosialisasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).



## 1. Pembahasan Hasil Uji Parsial (Uji-t)

### a. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) variabel X.1 menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 diketahui bahwa nilai  $t$  hitung pada hubungan antara variabel sebesar 2,439 dengan probabilitas sebesar 0,017. Apabila ingin mengetahui variabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dan  $n = 95$  sebesar 1,661. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  dan menunjukkan angka positif ( $2,439 > 1,661$ ) maka terdapat pengaruh positif. Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai  $\rho=0,05$  ( $0,017 < 0,05$ ), menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan nilai koefisien jalur variabel sosialisasi pajak berpengaruh sebesar 27% terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan 73% sisanya adalah pengaruh diluar sosialisasi pajak. Variabel lain yang dimaksud seperti kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Jadi kesimpulan dari hipotesis H.1 adalah diterima yaitu sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak dapat merubah cara berpikir seseorang dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar pajak. Artinya semakin sering pemerintah atau fiskus melakukan sosialisasi pajak maka

akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Donny Binambuni (2013) dan Dhani Kurniawan (2006) sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.

**b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) variabel X.2 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada hubungan antara variabel sebesar 2,391 dengan probabilitas sebesar 0,019. Apabila ingin mengetahui variabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dan  $n = 95$  sebesar 2,391. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  dan menunjukkan angka positif ( $2,391 > 1,661$ ) maka terdapat pengaruh positif. Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai  $\rho=0,05$  ( $0,019 < 0,05$ ), menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berdasarkan nilai koefisien jalur variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 21,6% terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan 78,6% sisanya adalah pengaruh diluar kesadaran wajib pajak. Variabel lain yang dimaksud seperti kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Jadi kesimpulan dari hipotesis H.2 adalah diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Wajib pajak tidak akan patuh membayar pajak jika tidak atas dasar sadar diri sendiri. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak yang tinggi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB yang tinggi pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dan Anisa Nirmala Santi (2012) dan Doni Sapriadi (2013) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**c. Pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) variabel X.3 menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 diketahui bahwa nilai  $t$  hitung pada hubungan antara variabel sebesar (2,215) dengan probabilitas sebesar 0,029. Untuk mengetahui variabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dan  $n = 95$  sebesar 1,661. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  dan menunjukkan angka positif ( $2,215 > 1,661$ ). Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai  $\rho=0,05$  ( $0,029 < 0,05$ ), menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berdasarkan nilai koefisien jalur variabel sanksi pajak berpengaruh sebesar 13,6% terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan 86,4% sisanya adalah pengaruh diluar sanksi pajak. Variabel lain yang dimaksud seperti kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Jadi kesimpulan dari hipotesis H.3 adalah

diterima yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Secara statistik menjelaskan bahwa semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi pajak bisa merubah kebiasaan seseorang menjadi patuh membayar pajak. Wajib pajak pasti akan jera bilamana terus menerus dikenai sanksi karena adanya tekanan mental sebagai akibat pelanggaran pajak yang dibuatnya sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) dan Doni Sapriadi (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**d. Pengaruh dominasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.**

Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB adalah sosialisasi pajak. Hal ini dapat dilihat pada analisis deskriptif, dimana variabel sosialisasi pajak yang paling tinggi skalanya dengan nilai 4,37. Variabel lain seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak skalanya hanya 4,33 dan 3,98. Hal lain yang dapat dilihat pada tabel 4.19 diketahui bahwa nilai t hitung sosialisasi pajak pada hubungan antara variabel sebesar 2,439 sedangkan variabel kesadaran wajib pajak hanya 2,391 dan variabel sanksi pajak hanya 2,215.

Semakin sering pemerintah atau fiskus melakukan sosialisasi tentang PBB maka akan semakin tinggi pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan sosialisasi dapat memberikan pemahaman

kepada wajib pajak mengenai perpajakan. Dari sisi lain kesadaran wajib pajak tidak akan muncul begitu saja tanpa ada yang memengaruhinya. Kesadaran itu muncul karena adanya pengaruh dari luar pribadi seseorang yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera. Jadi kesimpulan dari hipotesis H.4 adalah ditolak yaitu kesadaran wajib pajak bukan yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

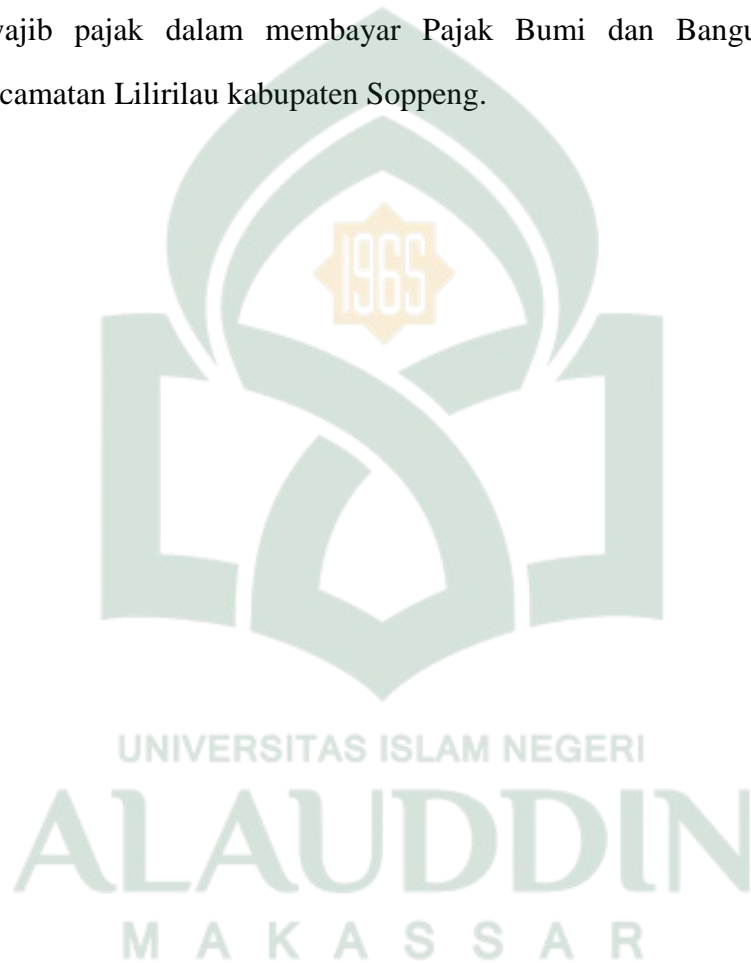
## **2. Pembahasan Uji Simultan (Uji-F)**

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi sosialisasi pajak (X.1), kesadaran wajib pajak (X.2), sanksi pajak (X.3), secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y). Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.20 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,312 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,472. Dapat diketahui bahwa  $F_{hitung}$  (16,312) >  $F_{tabel}$  (2,472) jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai P value sebesar 0,000<sup>b</sup> lebih kecil dari 0,05. Berarti bahwa sosialisasi pajak (X.1), kesadaran wajib pajak (X.2), sanksi pajak (X.3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y).

Proporsi variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dijelaskan oleh variabel sosialisasi pajak (X.1), kesadaran wajib pajak (X.2), sanksi pajak (X.3), secara simultan ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ). Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai  $R^2$  adalah 0,350 atau 35% artinya dari kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dijelaskan oleh variabel bahwa sosialisasi pajak (X.1), kesadaran wajib pajak (X.2), sanksi pajak (X.3), secara simultan dan sisanya sebesar 65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Variabel lain yang dimaksud seperti kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

Penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa faktor sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa:

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng . Hal ini berarti sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel sosialisasi pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut jelas karena masyarakat pada umumnya tidak patuh bayar pajak karena dua kemungkinan tidak memahami makna pajak dan kurang sadar. Jika pemerintah/fiskus rutin melakukan sosialisasi pajak, maka dengan sendirinya masyarakat akan patuh bayar pajak.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:



1. Untuk pemerintah/fiskus diharapkan dapat memperhatikan dan memahami tingkat kesadaran wajib pajak. Dari sisi luar pemerintah/fiskus harus melakukan sosialisasi pajak secara rutin dan menegakkan sanksi pajak secara tegas lalu dikontrol efektivitas kerjanya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan survei wawancara selain kuesioner, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya respon bias. Bias juga dengan menambah atau bahkan mengganti variabel-variabel lainnya, hal ini bertujuan agar responden dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya.
3. Penelitian mengambil objek yang terbatas yaitu hanya di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya lagi sehingga tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas, misalnya seluruh desa di Kecamatan Lilirilau atau seluruh kecamatan di kabupaten Soppeng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Cet.1; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Adelina, Rima. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik". Skripsi untuk program studi S-1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, 2012.
- Arum, Harjanti Puspa. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap)". Skripsi untuk program studi S-1 Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Aryobimo, Putut Tri. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Skripsi untuk program studi S-1 Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Ash-Shiddiq, Muhammad. "Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Daam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) Di Tanggerang Selatan". Skripsi untuk program studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Binambuni, Dony. "Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud" Oleh: *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087*, 2013.
- Budiati, Ayu Aroma. "Fungsi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah". Skripsi untuk program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Jember, 2013.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchamad Syafruddin. "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta". *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 3*, 2012.
- Hardianigsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-487*, 2011.
- Hendri, Jon dan Lena Farida. "Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan". *Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218*, 2013.
- Jamaluddin M. "*Pengantar Perpajakan*". Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2011.
- Jatmiko, Agus Nugroho. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Kesadaran Dan Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepathan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak

- Orang Pribadi Di Kota Semarang”. *Tesis untuk Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2006.
- Jumiarti, Veri. “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sungai Paduan kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara”. *Jurnal Publika, S-1 Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1 No. 1 Desember 2012*.
- Kurniawan, Dhani. “Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus”. Skripsi: FIS UNNES.
- Kahono, Sulud. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang”. Tesis untuk program studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Koentarto, Ilham. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)”. *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan Juni 2011, Volume 3 Nomor 2*, 2011.
- Larasati, Amelia Ratih. Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Tegal. *Accounting Analysis Journal Vol. 2 No. 2 Universitas Negeri Semarang*, 2013.
- Masruroh, Siti. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal. Skripsi untuk program studi S-1 akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Nurina, Latifah. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. Skripsi. 2010.
- Pranadata, I Gede Putu. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Skripsi untuk program studi S-1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Prihrtanto, Christian Danang dan Devy Pusposari. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Vol 2, No 1: Semester Ganjil 2013/2014 - S1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang*, 2013.
- Rahman, Abdul. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Skripsi untuk program studi Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. “*Perpajakan: Teori dan Kasus*”. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Rustiyaningsih, Sri. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No. 02 tahun XXXV / Juli 2011*.
- Sapiadi, Doni. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

pada Kecamatan Selupu Rejang”. Skripsi untuk program studi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013.

Santi, Anisa Nirmala. “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi empiris pada WPOP di wilayah KPP Pratama Semarang”. Skripsi untuk program sarjana fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas diponegoro Semarang, 2012.

Suyatmin. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan ( Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Surakarta)”. Tesis untuk program studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Waluyo. “*Perpajakan Indonesia*”. Jakarta: Salemba Empat, 2010.



L

A

M

P

I

R

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

## Lampiran 1

### DAFTAR REALISASI PENEIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2011-2013

Tabel 1.1

#### Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

#### Kecamatan Lilirilau Sektor Pedesaan

Tahun 2011

No.	Desa	Potensi	Realisasi	Sisa	Rata-Rata(%)
1.	Parenring	Rp 50,325,982	Rp 50,403,204	Rp 77,222	100.15%
2.	Paroto	Rp 71,509,348	Rp 71,509,337	Rp (11)	100.00%
3.	Palangiseng	Rp 43,721,363	Rp 44,086,190	Rp 364,827	100.83%
4.	Tetewatu	Rp 31,856,682	Rp 31,860,119	Rp 3,437	100.01%
5.	Masing	Rp 66,256,408	Rp 66,154,335	Rp (102,073)	99.85%
6.	Kebo	Rp 74,926,241	Rp 70,267,948	Rp (4,658,293)	93.78%
7.	Baringeng	Rp 137,759,804	Rp 122,032,718	Rp (15,727,086)	88.58%
8.	Abbanuange	Rp 79,644,415	Rp 81,385,947	Rp 1,741,532	102.19%
Jumlah		Rp 556,000,243	Rp 537,699,798	Rp (18,300,445)	96.71%

sumber: kantor kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng 2011

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Tabel 1 2

**Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Kecamatan Lilirilau Sektor Pedesaan**

**Tahun 2012**

No.	Desa	Potensi	Realisasi	Sisa	Rata-Rata(%)
1.	Parenring	Rp 49,381,561	Rp 49,704,625	Rp 323,064	100.65%
2.	Paroto	Rp 72,103,445	Rp 71,509,348	Rp (594,097)	99.17%
3.	Palangiseng	Rp 43,774,164	Rp 44,069,126	Rp 294,962	100.67%
4.	Tetewatu	Rp 31,776,029	Rp 31,809,511	Rp 33,482	100.11%
5.	Masing	Rp 66,036,234	Rp 66,180,225	Rp 143,991	100.22%
6.	Kebo	Rp 79,642,874	Rp 68,256,639	Rp (11,386,235)	89.70%
7.	Baringeng	Rp 157,546,005	Rp 141,617,675	Rp (15,928,330)	87.89%
8.	Abbanuange	Rp 81,717,257	Rp 79,745,463	Rp (1,971,794)	97.59%
Jumlah		Rp 581,411,123	Rp 552,892,612	Rp (28,518,511)	95.09%

*sumber: kantor kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng 2012*

Tabel 1.3

**Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Kecamatan Lilirilau Sektor Pedesaan**

**Tahun 2013**

No.	Desa	Potensi	Realisasi	Sisa	Rata-Rata(%)
1.	Parenring	Rp 49,599,798	Rp 45,786,316	Rp (3,813,482)	92.31%
2.	Paroto	Rp 72,103,445	Rp 71,509,348	Rp (594,097)	99.18%
3.	Palangiseng	Rp 43,806,273	Rp 43,816,273	Rp 10,000	100.02%
4.	Tetewatu	Rp 31,766,478	Rp 31,777,300	Rp 10,822	100.03%
5.	Masing	Rp 66,413,340	Rp 66,417,056	Rp 3,716	100.01%
6.	Kebo	Rp 97,044,677	Rp 74,489,042	Rp (22,555,635)	76.76%
7.	Baringeng	Rp 150,533,914	Rp 128,971,904	Rp (21,562,010)	78.68%
8.	Abbanuange	Rp 83,697,543	Rp 83,876,256	Rp 178,713	100.21%
Jumlah		Rp 594,965,468	Rp 546,643,495	Rp (48,321,973)	91.88%

*sumber: kantor kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng 2013*



### Lampiran 3

#### Hasil Jawaban Responden

##### A. Sosialisasi Pajak ( $X_1$ )

Responden	X1							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	4	5	5	4	5	4	32
2	5	5	4	5	4	5	5	33
3	5	4	5	5	4	5	4	32
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	4	5	5	4	5	4	32
6	5	4	4	5	4	4	3	29
7	5	5	5	5	4	5	4	33
8	4	4	3	4	3	4	3	25
9	5	4	5	4	5	4	4	31
10	5	4	5	5	4	5	4	32
11	5	5	5	4	4	4	4	31
12	5	4	5	4	4	5	4	31
13	5	4	5	5	4	5	4	32
14	4	5	4	4	4	3	4	28
15	5	4	5	5	4	5	4	32
16	5	4	4	4	4	4	4	29
17	4	4	4	4	4	5	4	29
18	4	4	3	4	3	3	4	25
19	5	4	5	5	4	5	4	32
20	5	4	5	5	4	5	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	5	4	4	5	5	5	5	33
24	5	4	5	5	4	5	4	32
25	4	5	5	5	4	4	4	31
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	4	4	5	4	4	4	5	30
28	5	4	5	5	4	5	4	32
29	4	4	5	3	4	4	5	29
30	4	4	5	4	4	3	3	27
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	4	4	5	5	4	4	4	30

33	5	4	5	5	5	5	4	33
34	4	4	5	4	4	4	3	28
35	5	5	5	4	5	5	4	33
36	4	5	4	4	4	5	4	30
37	5	5	5	5	5	5	4	34
38	5	5	5	4	5	5	4	33
39	5	4	4	4	5	5	4	31
40	5	4	4	4	4	4	3	28
41	4	5	4	5	4	5	5	32
42	5	4	5	4	4	4	4	30
43	4	4	4	5	5	3	3	28
44	5	4	4	4	4	4	4	29
45	5	4	4	4	5	4	4	30
46	5	4	5	5	4	5	4	32
47	5	5	5	4	4	4	4	31
48	5	5	4	4	4	4	4	30
49	4	4	5	5	4	5	5	32
50	5	5	4	4	4	4	4	30
51	4	4	5	4	4	5	5	31
52	5	4	5	5	4	5	4	32
53	5	4	5	5	4	5	4	32
54	5	5	5	5	4	5	4	33
55	4	5	5	5	4	4	4	31
56	4	5	5	5	4	4	4	31
57	4	5	5	5	4	4	4	31
58	5	5	5	5	5	5	4	34
59	4	5	5	5	4	4	4	31
60	4	5	5	5	4	4	4	31
61	4	5	5	5	4	4	4	31
62	5	4	4	4	3	4	3	27
63	4	4	3	4	4	4	4	27
64	5	5	5	5	4	4	5	33
65	5	4	4	3	4	4	4	28
66	5	4	4	4	3	4	3	27
67	5	4	5	5	4	5	4	32
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	4	4	5	4	3	4	4	28
70	5	4	5	5	4	5	4	32
71	4	5	5	3	5	4	4	30

72	4	5	5	4	3	5	4	30
73	5	4	5	3	4	3	4	28
74	5	4	5	5	4	5	4	32
75	4	4	4	5	5	4	4	30
76	5	4	4	4	4	3	4	28
77	4	5	4	4	4	5	4	30
78	5	4	4	4	4	4	5	30
79	5	4	5	5	4	5	4	32
80	5	4	5	5	5	4	5	33
81	5	4	4	4	5	4	4	30
82	5	5	4	5	4	4	4	31
83	5	5	5	4	4	4	4	31
84	5	5	5	5	4	3	5	32
85	5	4	5	5	4	4	4	31
86	5	5	4	5	4	5	4	32
87	5	4	5	5	4	5	5	33
88	4	4	5	4	5	5	4	31
89	4	4	5	4	4	4	4	29
90	5	4	5	5	4	5	4	32
91	4	5	5	4	5	5	5	33
92	5	4	5	5	5	5	5	34
93	5	5	4	5	5	5	5	34
94	5	5	4	5	5	4	4	32
95	4	3	5	5	4	5	5	31

B. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )

Responden	X2							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	5	4	5	4	4	5	32
2	4	4	4	4	5	5	4	30
3	5	5	4	5	4	4	5	32
4	5	5	4	5	5	5	5	34
5	5	5	4	4	4	4	4	30
6	5	3	3	4	4	4	4	27
7	5	4	5	4	4	5	4	31
8	4	3	4	4	4	4	4	27
9	4	5	5	4	5	4	5	32
10	5	5	4	5	4	4	5	32

11	5	4	5	4	4	4	4	30
12	5	4	4	3	4	4	3	27
13	4	5	4	5	5	4	5	32
14	5	3	4	5	4	4	5	30
15	5	5	4	5	4	4	5	32
16	5	4	5	4	4	4	4	30
17	5	4	4	5	4	4	5	31
18	4	3	4	4	4	4	3	26
19	5	5	4	5	4	4	5	32
20	5	5	4	5	4	4	5	32
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	5	4	4	4	4	4	29
23	5	3	4	4	4	4	5	29
24	5	5	4	5	4	4	5	32
25	4	4	4	4	4	5	5	30
26	4	3	3	4	4	4	4	26
27	5	5	4	4	5	5	4	32
28	5	5	4	5	4	4	5	32
29	5	3	4	3	4	4	3	26
30	5	5	4	4	4	4	3	29
31	5	3	4	4	4	5	4	29
32	4	5	4	4	5	5	4	31
33	5	5	4	5	4	4	5	32
34	4	5	4	4	5	5	4	31
35	5	4	4	4	4	5	4	30
36	4	3	4	4	3	4	5	27
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	4	4	4	4	4	4	5	29
40	5	3	3	3	4	4	4	26
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	5	3	4	4	4	4	4	28
43	5	3	4	5	4	4	5	30
44	4	5	4	5	4	4	4	30
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	5	5	4	5	4	4	5	32
47	5	3	4	4	4	4	4	28
48	4	4	4	5	5	4	5	31
49	5	5	4	4	5	5	5	33

50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	5	5	5	5	5	4	4	33
52	5	5	4	5	4	4	5	32
53	4	3	4	3	4	4	4	26
54	5	5	4	5	5	5	5	34
55	5	5	4	4	4	5	4	31
56	5	5	4	4	4	5	4	31
57	5	5	4	4	4	5	4	31
58	5	5	5	5	5	5	5	35
59	5	5	3	3	3	3	4	26
60	5	5	4	4	4	5	4	31
61	5	5	4	4	4	5	4	31
62	5	5	3	4	3	5	3	28
63	4	4	4	4	5	4	5	30
64	5	5	5	5	5	5	5	35
65	4	4	4	4	5	4	4	29
66	5	5	3	4	3	4	5	29
67	5	5	4	5	4	4	5	32
68	4	4	5	4	4	5	5	31
69	4	4	5	3	4	3	4	27
70	5	5	4	5	4	4	5	32
71	3	3	3	4	4	3	3	23
72	4	3	4	5	5	5	4	30
73	4	3	3	5	4	4	3	26
74	5	5	4	5	4	4	5	32
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	5	3	4	4	4	4	5	29
77	3	4	5	4	3	4	3	26
78	5	5	4	4	5	4	5	32
79	5	5	4	5	4	4	5	32
80	5	4	4	5	5	5	4	32
81	5	4	4	4	4	4	4	29
82	5	4	3	4	4	4	3	27
83	5	5	4	4	4	4	4	30
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	5	4	4	5	5	5	4	32
86	5	5	4	5	4	4	5	32
87	5	5	5	5	5	5	5	35
88	5	5	5	5	4	4	5	33

89	5	4	4	4	4	4	4	29
90	4	4	5	4	4	4	5	30
91	5	4	4	3	5	4	4	29
92	3	4	4	5	3	4	4	27
93	5	5	4	4	4	5	5	32
94	5	5	5	5	5	5	4	34
95	5	4	5	4	5	4	4	31

### C. Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)

Responden	X3							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	5	4	3	4	4	4	28
2	4	4	4	5	4	4	4	29
3	4	4	4	4	4	5	4	29
4	4	4	4	4	5	4	5	30
5	4	5	4	4	5	4	4	30
6	4	4	3	3	4	3	4	25
7	4	4	4	3	4	4	5	28
8	4	4	4	3	3	4	4	26
9	4	4	4	4	4	4	5	29
10	4	5	4	3	4	4	5	29
11	3	4	3	3	3	3	2	21
12	1	2	3	3	3	3	3	18
13	4	4	3	3	3	4	4	25
14	3	4	3	2	3	3	2	20
15	4	4	4	4	5	4	5	30
16	3	4	4	3	3	3	4	24
17	5	4	4	4	5	5	4	31
18	3	2	2	2	1	3	3	16
19	4	4	5	4	4	4	5	30
20	4	5	5	4	5	5	5	33
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	3	4	3	4	4	26
23	4	5	4	3	5	4	4	29
24	4	4	4	4	4	4	5	29
25	4	4	4	3	5	4	5	29
26	4	5	3	3	5	4	4	28
27	4	4	4	5	4	4	5	30

28	4	5	4	3	4	4	5	29
29	5	4	3	2	4	4	4	26
30	5	4	4	3	5	3	5	29
31	4	4	2	2	4	4	4	24
32	4	4	3	4	3	4	4	26
33	4	5	4	3	4	4	4	28
34	4	5	4	4	4	5	4	30
35	4	4	4	3	5	4	4	28
36	4	5	4	4	3	4	5	29
37	5	5	5	4	2	2	5	28
38	5	5	5	4	2	2	5	28
39	4	4	4	3	3	4	4	26
40	4	5	4	3	4	3	5	28
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	3	4	4	4	2	4	4	25
43	4	5	4	2	2	4	4	25
44	3	4	3	3	2	4	4	23
45	5	4	4	4	4	4	5	30
46	5	4	4	4	4	4	5	30
47	4	4	4	4	5	4	5	30
48	5	5	5	5	5	4	4	33
49	5	5	4	5	4	4	4	31
50	4	5	5	4	5	4	5	32
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	3	4	4	3	4	3	3	24
53	4	4	4	3	4	4	5	28
54	4	4	4	5	4	4	5	30
55	4	4	4	4	4	5	4	29
56	4	4	4	4	4	5	4	29
57	4	4	4	3	4	5	4	28
58	5	5	5	4	2	2	5	28
59	4	4	4	4	4	5	4	29
60	4	4	4	4	5	4	4	29
61	4	4	4	4	4	4	5	29
62	4	4	3	3	4	3	5	26
63	4	4	5	4	5	4	5	31
64	5	4	5	4	5	5	5	33
65	4	4	3	3	3	4	5	26
66	3	5	4	3	5	5	3	28



67	4	5	5	4	5	4	5	32
68	4	5	4	4	4	4	5	30
69	4	4	4	3	5	4	5	29
70	4	5	4	4	5	4	5	31
71	3	4	1	1	3	3	5	20
72	4	4	5	3	5	4	5	30
73	4	3	3	2	3	4	3	22
74	4	4	4	3	4	4	4	27
75	4	4	5	2	1	5	4	25
76	5	4	4	3	4	4	5	29
77	4	3	5	3	5	4	4	28
78	4	3	4	4	3	4	5	27
79	4	4	4	4	5	4	5	30
80	5	5	4	5	5	4	5	33
81	3	4	2	1	5	3	4	22
82	4	4	4	2	3	3	4	24
83	4	4	4	2	4	3	5	26
84	2	5	2	2	2	5	2	20
85	5	5	5	4	4	5	5	33
86	4	5	4	4	4	4	4	29
87	5	5	4	4	4	5	5	32
88	5	5	4	4	5	5	5	33
89	4	4	4	3	3	4	3	25
90	4	4	4	4	5	4	5	30
91	5	4	4	4	4	4	5	30
92	5	5	4	5	5	5	5	34
93	3	4	3	5	4	3	4	26
94	3	5	4	4	4	4	3	27
95	3	3	3	3	5	5	4	26

#### D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Y							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	5	4	4	5	4	4	31
2	4	5	5	5	5	5	4	33
3	4	5	4	5	5	4	4	31
4	5	5	4	5	4	4	4	31
5	5	4	4	5	4	4	4	30

6	5	5	3	4	4	4	3	28
7	5	4	4	4	5	4	4	30
8	4	4	3	4	4	3	4	26
9	5	5	4	5	4	4	4	31
10	4	4	4	5	4	4	4	29
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	4	4	4	2	4	26
13	5	4	4	4	4	4	4	29
14	4	5	4	4	4	4	4	29
15	4	4	4	5	4	4	4	29
16	5	5	4	5	4	4	4	31
17	5	4	4	5	4	4	4	30
18	4	4	4	4	4	2	4	26
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	5	5	4	5	5	5	5	34
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	5	5	3	4	4	4	3	28
24	5	4	4	4	5	4	4	30
25	5	5	4	4	3	4	4	29
26	5	4	4	5	5	4	5	32
27	4	5	4	4	4	4	4	29
28	5	4	4	5	4	4	4	30
29	4	5	5	4	4	5	4	31
30	4	5	4	4	4	4	3	28
31	4	4	4	5	4	4	3	28
32	4	5	5	5	4	4	4	31
33	5	4	4	4	4	5	4	30
34	5	4	5	5	4	5	4	32
35	4	5	3	4	4	4	3	27
36	5	5	4	5	4	4	4	31
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	4	5	5	5	5	4	4	32
40	4	5	4	4	4	4	3	28
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	5	4	5	4	3	4	29
44	4	4	5	5	4	4	4	30

45	4	5	5	5	4	4	4	31
46	4	4	4	5	4	4	4	29
47	5	5	4	5	4	4	4	31
48	4	4	5	5	4	4	4	30
49	4	4	5	5	5	5	4	32
50	5	5	4	5	5	4	4	32
51	5	4	5	5	4	4	4	31
52	5	5	4	5	4	4	4	31
53	4	5	4	5	4	4	4	30
54	4	5	5	4	4	4	4	30
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	4	4	4	4	5	4	29
58	5	5	5	5	5	5	5	35
59	4	5	4	4	4	4	4	29
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	4	4	5	4	4	5	30
62	3	5	3	5	4	3	4	27
63	4	4	3	4	4	4	4	27
64	5	5	5	5	5	5	5	35
65	4	4	4	4	4	4	4	28
66	4	4	5	4	5	3	5	30
67	5	5	4	5	4	4	4	31
68	5	4	5	5	4	4	4	31
69	4	4	3	3	5	4	4	27
70	4	4	4	5	4	5	4	30
71	4	4	5	4	4	4	3	28
72	4	5	4	3	5	5	4	30
73	4	5	4	3	4	4	3	27
74	4	5	4	5	4	4	4	30
75	4	5	4	4	4	3	4	28
76	5	4	4	5	4	4	4	30
77	4	5	5	5	4	4	5	32
78	5	4	4	4	4	4	3	28
79	4	4	4	4	5	4	4	29
80	4	5	4	5	5	4	5	32
81	4	4	4	5	3	2	4	26
82	5	4	4	4	4	4	4	29
83	5	5	4	5	5	4	4	32

84	5	5	4	5	4	5	4	32
85	4	5	5	5	4	4	4	31
86	4	5	4	4	4	5	4	30
87	4	5	5	5	4	4	4	31
88	4	5	5	5	4	5	5	33
89	4	4	4	4	4	4	3	27
90	4	4	4	5	4	5	4	30
91	5	5	4	4	5	4	5	32
92	5	5	5	5	4	5	4	34
93	4	3	5	4	3	4	4	27
94	4	4	3	4	5	5	5	30
95	4	3	3	3	4	5	4	26



## Lampiran 4: Hasil Olah Data SPSS

### CORRELATIONS

```
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 SOSIALISASI_PAJAK
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
```

## Correlations

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI  
PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	SOSIALISASI_ PAJAK
X1.1	Pearson Correlation	1	-.009	.134	.262*	.194	.304**	.057	.487**
	Sig. (2-tailed)		.929	.195	.010	.060	.003	.584	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X1.2	Pearson Correlation	-.009	1	.096	.092	.165	-.016	.125	.350**
	Sig. (2-tailed)	.929		.357	.374	.110	.879	.226	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X1.3	Pearson Correlation	.134	.096	1	.329**	.145	.353**	.248*	.606**
	Sig. (2-tailed)	.195	.357		.001	.162	.000	.016	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X1.4	Pearson Correlation	.262*	.092	.329**	1	.134	.413**	.168	.640**
	Sig. (2-tailed)	.010	.374	.001		.197	.000	.104	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X1.5	Pearson Correlation	.194	.165	.145	.134	1	.205*	.311**	.538**
	Sig. (2-tailed)	.060	.110	.162	.197		.046	.002	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X1.6	Pearson Correlation	.304**	-.016	.353**	.413**	.205*	1	.286**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.003	.879	.000	.000	.046		.005	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X1.7	Pearson Correlation	.057	.125	.248*	.168	.311**	.286**	1	.555**
	Sig. (2-tailed)	.584	.226	.016	.104	.002	.005		.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
SOSIALISA SI_PAJAK	Pearson Correlation	.487**	.350**	.606**	.640**	.538**	.688**	.555**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95	95	95	95	95

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK  
/PRINT=TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE.

## Correlations

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI  
PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

		Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	KESADARAN_WAJIB_PAJAK
X2.1	Pearson Correlation	1	.342**	.051	.187	.111	.232*	.250*	.497**
	Sig. (2-tailed)		.001	.627	.070	.286	.024	.014	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X2.2	Pearson Correlation	.342**	1	.249*	.437**	.203*	.268**	.429**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.001		.015	.000	.049	.009	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X2.3	Pearson Correlation	.051	.249*	1	.215*	.390**	.274**	.281**	.550**
	Sig. (2-tailed)	.627	.015		.036	.000	.007	.006	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X2.4	Pearson Correlation	.187	.437**	.215*	1	.251*	.198	.535**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.070	.000	.036		.014	.055	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X2.5	Pearson Correlation	.111	.203*	.390**	.251*	1	.449**	.217*	.579**
	Sig. (2-tailed)	.286	.049	.000	.014		.000	.034	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X2.6	Pearson Correlation	.232*	.268**	.274**	.198	.449**	1	.103	.551**
	Sig. (2-tailed)	.024	.009	.007	.055	.000		.323	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X2.7	Pearson Correlation	.250*	.429**	.281**	.535**	.217*	.103	1	.686**
	Sig. (2-tailed)	.014	.000	.006	.000	.034	.323		.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
KESADARA_N_WAJIB_PAJAK	Pearson Correlation	.497**	.729**	.550**	.678**	.579**	.551**	.686**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95	95	95	95	95

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

# CORRELATIONS

/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 SANKSI\_PAJAK  
/PRINT=TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE.

## Correlations

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI  
PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

		Correlations							
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	SANKSI_ PAJAK
X3.1	Pearson Correlation	1	.386**	.511**	.409**	.251*	.180	.574**	.715**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.014	.080	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X3.2	Pearson Correlation	.386**	1	.361**	.275**	.183	.122	.231*	.532**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.007	.076	.238	.024	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X3.3	Pearson Correlation	.511**	.361**	1	.521**	.282**	.175	.419**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.006	.090	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X3.4	Pearson Correlation	.409**	.275**	.521**	1	.339**	.230*	.362**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000		.001	.025	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X3.5	Pearson Correlation	.251*	.183	.282**	.339**	1	.359**	.342**	.660**
	Sig. (2-tailed)	.014	.076	.006	.001		.000	.001	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X3.6	Pearson Correlation	.180	.122	.175	.230*	.359**	1	.027	.460**
	Sig. (2-tailed)	.080	.238	.090	.025	.000		.794	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
X3.7	Pearson Correlation	.574**	.231*	.419**	.362**	.342**	.027	1	.659**
	Sig. (2-tailed)	.000	.024	.000	.000	.001	.794		.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
SANKSI_ PAJAK	Pearson Correlation	.715**	.532**	.723**	.719**	.660**	.460**	.659**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95	95	95	95	95

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



# CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

## Correlations

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

		Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK
Y1	Pearson Correlation	1	.146	.090	.270**	.214*	.224*	.157	.498**
	Sig. (2-tailed)		.159	.386	.008	.038	.029	.129	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
Y2	Pearson Correlation	.146	1	.122	.242*	.263*	.118	.061	.500**
	Sig. (2-tailed)	.159		.239	.018	.010	.253	.557	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
Y3	Pearson Correlation	.090	.122	1	.426**	.096	.202*	.255*	.560**
	Sig. (2-tailed)	.386	.239		.000	.353	.050	.013	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
Y4	Pearson Correlation	.270**	.242*	.426**	1	.056	.050	.316**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.008	.018	.000		.593	.634	.002	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
Y5	Pearson Correlation	.214*	.263*	.096	.056	1	.357**	.461**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.038	.010	.353	.593		.000	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
Y6	Pearson Correlation	.224*	.118	.202*	.050	.357**	1	.239*	.566**
	Sig. (2-tailed)	.029	.253	.050	.634	.000		.020	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
Y7	Pearson Correlation	.157	.061	.255*	.316**	.461**	.239*	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.129	.557	.013	.002	.000	.020		.000
	N	95	95	95	95	95	95	95	95
KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK	Pearson Correlation	.498**	.500**	.560**	.586**	.613**	.566**	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95	95	95	95	95

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## RELIABILITY

```
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA  
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR  
/SUMMARY=TOTAL.
```

## Reliability

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

## Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
		N
		%
Cases	Valid	95
	Excluded <sup>a</sup>	0
	Total	95

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.631	.622	7

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.63	.485	95
X1.2	4.34	.497	95
X1.3	4.61	.551	95
X1.4	4.48	.581	95
X1.5	4.16	.512	95
X1.6	4.39	.624	95
X1.7	4.09	.507	95

**Inter-Item Correlation Matrix**

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
X1.1	1.000	-.009	.134	.262	.194	.304	.057
X1.2	-.009	1.000	.096	.092	.165	-.016	.125
X1.3	.134	.096	1.000	.329	.145	.353	.248
X1.4	.262	.092	.329	1.000	.134	.413	.168
X1.5	.194	.165	.145	.134	1.000	.205	.311
X1.6	.304	-.016	.353	.413	.205	1.000	.286
X1.7	.057	.125	.248	.168	.311	.286	1.000

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	26.07	3.665	.282	.138	.612
X1.2	26.37	3.937	.121	.053	.656
X1.3	26.09	3.321	.397	.189	.576
X1.4	26.22	3.195	.429	.235	.564
X1.5	26.55	3.527	.330	.151	.598
X1.6	26.32	3.006	.475	.301	.544
X1.7	26.61	3.496	.354	.177	.591

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
30.71	4.423	2.103	7

RELIABILITY

```

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.

```

## Reliability

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
		N
		%
Cases	Valid	95
	Excluded <sup>a</sup>	0
	Total	95
		100.0
		.0
		100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.724	.721	7

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.66	.538	95
X2.2	4.33	.778	95
X2.3	4.11	.535	95
X2.4	4.34	.612	95
X2.5	4.22	.549	95
X2.6	4.28	.519	95
X2.7	4.36	.667	95

**Inter-Item Correlation Matrix**

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
X2.1	1.000	.342	.051	.187	.111	.232	.250
X2.2	.342	1.000	.249	.437	.203	.268	.429
X2.3	.051	.249	1.000	.215	.390	.274	.281
X2.4	.187	.437	.215	1.000	.251	.198	.535
X2.5	.111	.203	.390	.251	1.000	.449	.217
X2.6	.232	.268	.274	.198	.449	1.000	.103
X2.7	.250	.429	.281	.535	.217	.103	1.000

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	25.63	5.682	.317	.162	.718
X2.2	25.97	4.435	.532	.324	.668
X2.3	26.19	5.538	.381	.218	.705
X2.4	25.96	4.998	.516	.354	.672
X2.5	26.07	5.431	.411	.296	.698
X2.6	26.01	5.564	.389	.272	.703
X2.7	25.94	4.847	.508	.373	.673

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
30.29	6.785	2.605	7

RELIABILITY

```

/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.

```

## Reliability

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	95	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.757	.760	7

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	3.98	.684	95
X3.2	4.22	.622	95
X3.3	3.86	.752	95
X3.4	3.47	.873	95
X3.5	3.88	.977	95
X3.6	3.96	.683	95
X3.7	4.33	.750	95

**Inter-Item Correlation Matrix**

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
X3.1	1.000	.386	.511	.409	.251	.180	.574
X3.2	.386	1.000	.361	.275	.183	.122	.231
X3.3	.511	.361	1.000	.521	.282	.175	.419
X3.4	.409	.275	.521	1.000	.339	.230	.362
X3.5	.251	.183	.282	.339	1.000	.359	.342
X3.6	.180	.122	.175	.230	.359	1.000	.027
X3.7	.574	.231	.419	.362	.342	.027	1.000

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	23.73	8.967	.595	.467	.705
X3.2	23.48	9.976	.384	.192	.745
X3.3	23.84	8.688	.590	.407	.703
X3.4	24.23	8.308	.556	.343	.708
X3.5	23.82	8.383	.448	.268	.740
X3.6	23.75	10.170	.283	.183	.763
X3.7	23.38	9.025	.506	.414	.721

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27.71	11.870	3.445	7

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.

```



## Reliability

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	95	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.643	.647	7

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Y1	4.35	.500	95
Y2	4.46	.542	95
Y3	4.17	.577	95
Y4	4.47	.581	95
Y5	4.21	.503	95
Y6	4.07	.623	95
Y7	4.01	.495	95

**Inter-Item Correlation Matrix**

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
Y1	1.000	.146	.090	.270	.214	.224	.157
Y2	.146	1.000	.122	.242	.263	.118	.061
Y3	.090	.122	1.000	.426	.096	.202	.255
Y4	.270	.242	.426	1.000	.056	.050	.316
Y5	.214	.263	.096	.056	1.000	.357	.461
Y6	.224	.118	.202	.050	.357	1.000	.239
Y7	.157	.061	.255	.316	.461	.239	1.000

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	25.40	3.817	.313	.141	.618
Y2	25.28	3.823	.266	.146	.633
Y3	25.58	3.587	.348	.227	.609
Y4	25.27	3.499	.389	.333	.595
Y5	25.54	3.634	.413	.353	.590
Y6	25.67	3.520	.330	.187	.616
Y7	25.74	3.622	.433	.329	.585

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29.75	4.680	2.163	7

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

/METHOD=ENTER SOSIALISASI\_PAJAK KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK SANKSI\_PAJAK

/SCATTERPLOT=(\*SRESID ,\*ZPRED)

/RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)

/SAVE RESID.

## Regression

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SANKSI_PAJAK, SOSIALISASI_PAJAK, KESADARAN_WAJIB_PAJAK <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.591 <sup>a</sup>	.350	.328	1.794	.350	16.312	3	91	.000

a. Predictors: (Constant), SANKSI\_PAJAK, SOSIALISASI\_PAJAK, KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.493	3	52.498	16.312	.000 <sup>b</sup>
	Residual	292.864	91	3.218		
	Total	450.358	94			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI\_PAJAK, SOSIALISASI\_PAJAK, KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.193	2.811		3.982	.000		
SOSIALISASI_PAJAK	.270	.111	.259	2.439	.017	.633	1.581
KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.216	.090	.257	2.391	.019	.618	1.619
SANKSI_PAJAK	.136	.061	.213	2.215	.029	.771	1.298

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	SOSIALISASI_PAJAK	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	SANKSI_PAJAK
1	1	3.985	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.009	21.107	.07	.02	.02	.96
	3	.004	33.361	.45	.00	.76	.03
	4	.002	44.334	.48	.97	.22	.01

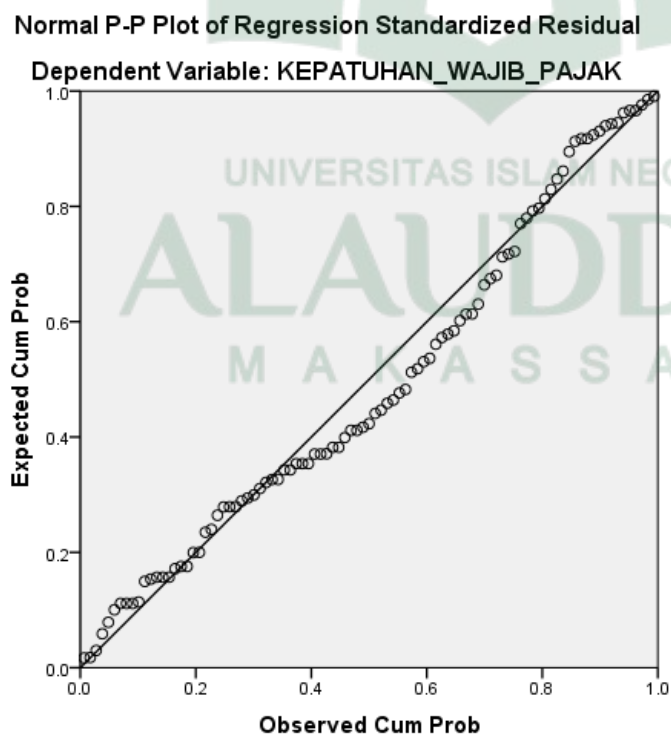
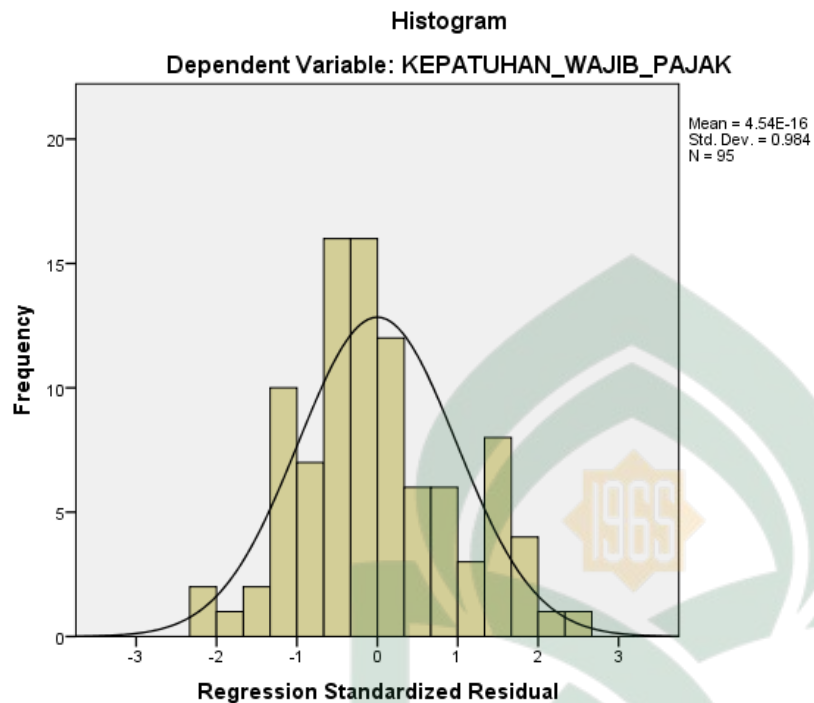
a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

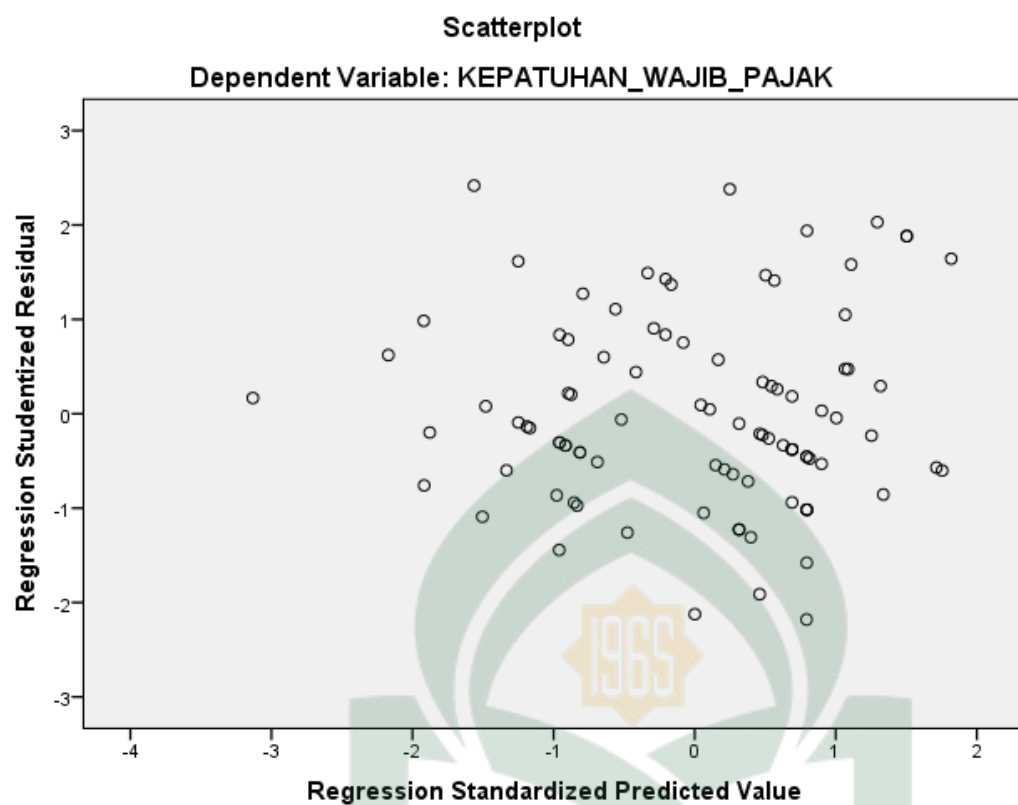
Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.73	32.13	29.78	1.294	95
Std. Predicted Value	-3.132	1.818	.000	1.000	95
Standard Error of Predicted Value	.191	.731	.349	.118	95
Adjusted Predicted Value	25.67	32.11	29.76	1.289	95
Residual	-3.805	4.246	.000	1.765	95
Std. Residual	-2.121	2.367	.000	.984	95
Stud. Residual	-2.180	2.417	.005	1.011	95
Deleted Residual	-4.020	4.675	.018	1.864	95
Stud. Deleted Residual	-2.227	2.485	.007	1.021	95
Mahal. Distance	.075	14.615	2.968	2.974	95
Cook's Distance	.000	.282	.014	.036	95
Centered Leverage Value	.001	.155	.032	.032	95

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

## Charts





## NPar Tests

[DataSet1] D:\bikinko folder\Documents\Documents\REFERENSI SKRIPSI PAJAKKU\Untitled OLAH DATA SPSS.sav

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76510050
	Absolute	.086
Most Extreme Differences	Positive	.086
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.480

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 2

### KUESIONER PENELITIAN

#### A. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut anda benar.
2. Anda cukup member tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda.
3. Apabila anda salah menjawab, cukup lingkari (O) tanda silang yang salah tersebut.
4. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

#### B. Data Responden

1. Nama Responden:
2. Jenis Kelamin:
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
3. Umur:
  - a. 20 – 25 tahun
  - b. 26 – 30 tahun
  - c. 31 – 35 tahun
  - d. 36 – 40 tahun
  - e. > 40 tahun
4. Pendidikan:
  - a. SMU
  - b. D3
  - c. S1
  - d. S2
5. Lama menjadi Wajib Pajak:
  - a. 1 – 5 tahun
  - b. 6 – 10 tahun
  - c. 11 – 15 tahun
  - d. > 15 tahun

### C. Data Penelitian

#### Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

#### Sosialisasi Pajak (X1)

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Sosialisasi pajak sangat penting untuk mengetahui cara mengisi dan melunasi tagihan pajak.					
2.	Pemerintah/fiskus harus sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.					
3.	Setiap ada perubahan ketentuan perpajakan dari pusat, harus disampaikan kepada wajib pajak/masyarakat.					
4.	Sosialisasi mengenai sanksi perpajakan bagi wajib pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang akan diterima apabila wajib pajak melakukan pelanggaran.					
5.	Sosialisasi mengenai tujuan membayar pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui tujuan mereka membayar pajak bumi dan bangunan.					
6.	Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah/fiskus, akan memberikan informasi pajak bagi wajib pajak.					
7.	Saya akan segera membayar pajak bumi dan bangunan jika sudah ada pemberitahuan dari pemerintah setempat, tanpa harus mengulur-ulur waktu.					

#### Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2.	Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat.					
3.	Pajak bumi dan bangunan yang saya bayarkan tidak memberatkan bagi saya					
4.	Saya memahami betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi					



	pembangunan daerah.					
5.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai ketentuan perpajakan.					
6.	Saya menjalankan kewajiban saya membayar pajak tanpa ada paksaan dari pemungut pajak					
7.	Saya sadar bahwa menunda membayar pajak dapat merugikan negara.					

### Sanksi Pajak (X3)

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya mengetahui sanksi denda yang dikenakan kepada saya jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan.					
2.	Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi pajak.					
3.	Sanksi denda pajak bumi dan bangunan tidak memberatkan bagi saya					
4.	Saya akan dikenakan denda administrasi karena keterlambatan saya membayar pajak.					
5.	Sanksi pajak berupa kurungan dan penyitaan dapat dikenakan pada wajib yang melakukan pelanggaran berat.					
6.	Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak dalam pembayarannya relatif ringan.					
7.	Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib yang melanggar.					

### KepatuhanWajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.					
2.	Dengan melakukan pembayaran PBB, berarti saya telah menjadi warga negara yang taat pajak.					
3.	Apabila membayar PBB berarti ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.					
4.	Membayar PBB merupakan suatu kewajiban setiap warga negara					
5.	Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar.					
6.	Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu.					
7.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika pemerintah/pemungut pajak membuthkan informasi tersebut.					

## RIWAYAT HIDUP



SYAMSU ALAM, Dilahirkan di Desa Baringeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Februari 1992. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari Ibunda Saheri dan ayahanda Muh.Tang. Penulis memulai pendidikan di Sekalah Dasar 110 Mappalakkae, kemudian pada kelas 4 (empat) SD penulis pindah ke Sekolah Dasar 144 Liliriawang, setelah tamat SD pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lappariaja hingga tahun 2007, kemudian pada tahun tersebut, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lappariaja hingga tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2014.

